



• TABLOID REFERENSI PEMILU 2024 •

info indonesia

MINGGU IV AGUSTUS 2023

Harga @ Rp 20.000,-



*Road to
Election
2024*



PRABOWO- ERICK THOHIR 99% KEHENDAK JOKOWI



PDIP PILIH
AHY, ANIES
TINGGAL
KENANGAN

GANJAR LIRIK
YENNY WAHID
AMANKAN
JATIM

PDIP-GANJAR
DISALIP
GERINDRA
PRABOWO

KEPALA BNN
DI PUSARAN
PILGUB
SULUT

AIRIN
PALING SIAP
JADI CAGUB
BANTEN

HERMAN DERU
TERANCAM
GAGAL DUA
PERIODE

“Amendemen itu biasa dalam politik. Silakan didiskusikan. Bangsa ini punya hak untuk mendiskusikan itu sesuai dengan kebutuhan generasinya”

Mahfud MD



Saling Salip

Dinamika politik Indonesia bergerak sangat cepat. Perubahan bisa terjadi dalam hitungan menit karena besarnya manuver yang dilakukan para elite politik di Tanah Air.

Akhir pekan lalu, publik dikejutkan dengan suksesnya lobi-lobi yang dilakukan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membawa Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pun bubar di tengah jalan. Golkar dan PAN yang mendukung Prabowo berbeda haluan dengan Partai Persatuan Pembangunan yang memilih gerbong PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo.

Kini, publik tinggal menanti siapa yang akan menjadi pendamping Prabowo ataupun Ganjar setelah parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi menentukan arah koalisinya.

Berbagai calon wakil presiden banyak disandingkan ke Ganjar, mulai dari Erick Thohir, Ridwan Kamil hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Demikian juga Prabowo Subianto yang coba disanding-sandingkan dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming. Indikasi itu semakin kuat dengan adanya upaya gugatan batas usia capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Upaya menyandingkan Ganjar-Erick atau Ganjar-Ridwan Kamil pun kini terhalang. Erick Thohir sejauh ini terus didorong PAN menjadi cawapres. Sementara, Ridwan Kamil bakal mengikuti Golkar yang sudah mendukung Prabowo Subianto.

Salip menyalip elektabilitas pun kini mulai terlihat, masuknya Golkar dan PAN membuat Prabowo Subianto semakin unggul atas Ganjar. Di Jawa Timur misalnya, nama Menteri Pertahanan itu lebih dikenal daripada Gubernur Jawa Tengah.

Sementara, Anies Baswedan masih tertinggal dari dua pesaingnya dan hingga kini perkembangan soal cawapres dinamikanya tidak sebesar Ganjar dan Prabowo.

Tabloid Info Indonesia edisi IV Agustus akan membahas bagaimana dinamika politik antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang salip menyalip dalam memimpin popularitas, termasuk peran Presiden Jokowi yang begitu besar. Di sisi lain, Anies akan siap memberi kejutan dahsyat meski posisinya masih tertinggal.

Besarnya dinamika politik ini juga berimbas pada keuangan negara. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah meningkatkan anggaran di bidang hukum dan pertahanan keamanan sebesar 2,3 persen. Secara persentase mungkin kecil tapi secara angka jumlahnya sangatlah besar.

Untuk apa saja tambahan anggaran itu digunakan pada Pemilu 2024, semuanya dibahas tuntas di rubrik Info Eksekutif.

Di lingkup legislatif, peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipertanyakan keberadaannya. Para senator ini dianggap tidak memiliki fungsi yang signifikan, bahkan pengaruh politiknya juga masih diperdebatkan.

Kekuatan politik DPD dianggap lemah karena tidak bisa memberikan keputusan politik apapun. Bahkan, keberadaan mereka ini dipertanyakan Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara yang juga anggota DPD.

Sementara, pelaksanaan Pilkada juga mulai memanas. Di Banten, misalnya, nama Airin Rachmi Diany makin menggema. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan ini dianggap sosok yang paling pas untuk menjadi gubernur Banten selanjutnya.

Hal berbeda terjadi di Pilkada Sumsel 2024, sang petahana Herman Deru mulai banyak mendapat saingan untuk mempertahankan posisinya. Ada beberapa nama yang telah menyatakan maju jadi orang nomor satu di Bumi Sriwijaya, di antaranya Ishak Mekki, Heri Amalindo, serta Eddy Santana Putra.

Para penyelenggara Pemilu juga masih mengalami permasalahan, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam beberapa hari ke depan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota akan mengalami kekosongan kepemimpinan.

Ada banyak sajian menarik lainnya yang kami sajikan di edisi IV ini. Selamat membaca!!!





“Kehendak atau tidak, Jokowi juga tetap akan memberikan dukungannya karena figur yang diusung selama masih merupakan bagian dari pemerintahannya pasti didukung, termasuk Prabowo dan Erick”

Herry Mendrofa

PRABOWO-ERICK THOHIR 99 PERSEN KEHENDAK JOKOWI

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berhasil menarik simpati publik. Terutama karena berhasil merayu dua partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, Partai Golkar dan PAN, masuk gerbong pengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Sejumlah pihak menilai, keputusan Partai Golkar dan PAN masuk dalam KKIR tidak lepas dari cawe-cawe politik Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024.

Tak sampai di situ, Menteri BUMN, Erick Thohir, disebut-sebut juga telah mendapat restu Presiden Jokowi untuk mendampingi Prabowo sebagai cawapres di pilpres mendatang.

Sejumlah lembaga survei pun belakangan mulai melakukan penajakan soal siapakah sosok kandidat capres dan cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi dari masyarakat.

Pengamat politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai, dukungan di belakang layar Presiden Jokowi terhadap Prabowo dan Erick Thohir kemungkinan menaikkan angka elektabilitas terhadap pasangan tersebut.

Pria yang akrab disapa Herry itu mengatakan, di dalam politik, segala kemungkinan dapat saja terjadi meskipun di KKIR masih banyak kader atau calon lain yang nantinya bisa diusung untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024.

Pada prinsipnya, Presiden Jokowi akan tetap mendukung para tokoh politik yang berpihak kepada pemerintahannya untuk maju sebagai kandidat capres-cawapres, termasuk Prabowo-Erick Thohir, Prabowo-Cak Imin, atau Prabowo-Airlangga.

“Untuk segala kemungkinan itu pasti ada, termasuk soal Prabowo didampingi oleh Erick Thohir. Saya kira hal ini adalah sebuah kemungkinan meskipun sebagai catatan di koalisi ini memiliki kader yang berlimpah yang bisa diusung sebagai cawapres,” ungkap Herry.

“Kehendak atau tidak, Jokowi juga tetap akan memberikan dukungannya karena figur yang diusung selama masih merupakan bagian dari pemerintahannya pasti didukung, termasuk Prabowo dan Erick,” sambung Herry.

Herry menambahkan, pada posisi ini, Presiden Jokowi juga akan mendukung siapapun calon pendamping Prabowo asalkan sosok tersebut

masih berada di bawah pemerintahannya.

Herry menilai, bukan hanya Erick Thohir yang akan didukung oleh Presiden Jokowi, namun ada pula Airlangga Hartarto atau Ridwan Kamil.

Di sisi lain, Herry menambahkan, peluang calon lain juga masih cukup besar lantaran KKIR sejauh ini masih dianggap menjadi sebuah wadah alternatif untuk mendorong orang-orang pilihan Jokowi untuk maju di Pilpres 2024.

“Artinya koalisi ini memiliki alternatif. Ya pasti ada peluang jika semuanya parpol yang dalam koalisi tersebut sepakat. Selain itu, kita harus tahu juga bahwa masih ada Cak Imin yang harus diperhitungkan betul terkait hal ini,” ujar Herry.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyatakan, peran Presiden Jokowi dalam menentukan cawapres di KKIR bisa jadi merupakan hal sakral untuk Prabowo menuju Pilpres 2024.

Menurut Ujang, peluang Erick Thohir untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024 bisa saja didapat, namun dirinya harus bersaing terlebih dahulu dengan sejumlah nama yang diketahui memiliki kekuatan dukungan. Seperti Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, hingga putra Jokowi, Gibran Rakabuming.

“Ternyata harus bersaing dulu di internal koalisi dengan dua

nama tersebut. Jangan lupa saingan terberat Erick Thohir di koalisi Prabowo sebenarnya adalah Gibran,” ungkap Ujang.

Ujang menuturkan, persaingan Erick Thohir terlalu ketat lantaran sosok Gibran sejauh ini memiliki kans jadi cawapres seandainya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas minimum capres-cawapres menjadi 35 tahun.

“Nah, kalau menjadi 35 tahun, maka kans Gibran masuk jadi cawapresnya Prabowo akan terjadi. Kalau itu terjadi, pasti Erick Thohir mundur, karena Gibran kan anaknya Jokowi, anaknya presiden pasti ya Erick Thohir akan mundur. Tetapi kalau Gibran-nya tidak mau, tidak jadi, Erick Thohir diyakini punya peluang menjadi cawapresnya Prabowo bersaing dengan Cak Imin dan Airlangga,” terang Ujang.

Akan tetapi, semua masih berpeluang menjadi cawapres mantan Komandan Jenderal Kopas-

sus itu tergantung koalisi. Selain itu, juga tergantung modal politik dari sosok yang bakal mendampingi Prabowo tersebut.

“Jadi tergantung nanti kompromi-komprominya, bagi-baginya seperti apa. Peluangnya ada masih 50-50. Kan perlu kompromi dan kompensasi. Jadi para calon harus kompromi dengan Gerindra, PKB dan Golkar,” tutur Ujang.

“Ya kalau saya lihat ya harus Erick Thohir kalau ingin menjadi cawapres harus didorong oleh banyak pihak. Ya Jokowi harus dorong, partai politik harus dorong, koalisi-koalisi tergabung juga harus didorong,” sambungnya.

Ujang menambahkan, faktor lain yang harus disiapkan oleh Erick Thohir dalam menuju Pilpres 2024 jika ingin dipasangkan dengan Prabowo yakni membangun

komunikasi yang intens dengan parpol pendukung, termasuk dengan Presiden Jokowi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political (IPO), Dedi Kurnia Syah, juga menyebutkan Presiden Jokowi memberikan sinyal dukungan kepada Erick Thohir untuk maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Sinyal dukungan itu terlihat dari berbagai kesempatan yang memperlihatkan Presiden Jokowi mengajak Erick dan Prabowo di berbagai kesempatan kunjungan daerah.

Dedi menganggap, Erick memiliki kedekatan dengan Jokowi maupun Prabowo. Kedekatan itu terlihat ketika keduanya masuk di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Jokowi.

“Presiden Jokowi banyak menandai perilaku dukungan pada Prabowo Subianto. Terlebih, Jokowi juga sudah memberikan dukungan kepada Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo,” kata Dedi.

Erick memang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Jokowi bahkan sebelum masuk di pemerintahan. Ada banyak tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada Erick dan selalu berhasil dilakukan dengan luar biasa.

Maka tidak mengherankan, eks presiden Inter Milan tersebut mendapatkan kepercayaan penuh Jokowi. Atas dasar itu, Dedi melihat, kans Erick sangat terbuka untuk menjadi cawapres pada Pilpres 2024, terutama mendampingi Prabowo.

Di samping itu, PAN juga getol mengusulkan Erick untuk menjadi cawapres, kini telah resmi bergabung ke koalisi Prabowo. “Sosok Erick Thohir ini dekat dengan Presiden Joko Widodo, situasi ini membuat Erick mudah mengemuka dibandingkan kandidat lain,” kata Dedi.

Sementara itu, Erick Thohir menanggapi keputusan PAN yang mengajukan sebagai bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Erick menyatakan dirinya siap disandingkan dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

“Proses ini harus kita hargai. Saya katakan siap, tetapi tidak mau ge-er (gede rasa),” ujar Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu, 16 Agustus 2023.

Erick menyatakan, koalisi antara PAN dan Gerindra dalam Pilpres 2024 telah menempuh tahap perjalanan yang panjang. Menurutnya, seperti halnya dalam sebuah pernikahan, sebelum mencapai tahap itu, kedua partai tersebut juga telah mengalami penajakan, sehingga terbentuk koalisi.

“Saya telah mengatakan bahwa ini seperti jatuh cinta, seseorang jatuh cinta dan tentu saja namanya manusia. Jatuh cinta saja belum cukup, kemudian naik ke pelaminan atau menikah, tetapi itu semua membutuhkan proses panjang. Ada proses mengenal satu sama lain, ada proses mendapatkan persetujuan dari orang tua, dan kadang-kadang bisa saja orang tua tidak setuju, yang akhirnya berujung pada perceraian,” jelasnya. •RDO



“Nah, kunjungan Ganjar ke kediaman istri Gus Dur beberapa waktu lalu juga bertemu Mbak Yenny. Itu dalam rangka mengimbangi posisi 08 (Prabowo) yang di sana sudah ada tokoh Jawa Timur, Cak Imin”

Ali Rif'an



GANJAR LIRIK YENNY WAHID AMANKAN SUARA JATIM

Dinamika politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terus memberikan kejutan kepada para kandidat, terutama bagi mereka yang berada di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo. Setidaknya, perubahan arah dukungan partai politik besar yang kini berada di parlemen menjadi penyebabnya.

Indikasi tersebut menguat ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mendapat dukungan dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), dalam acara deklarasi di Museum Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu pagi, 13 Agustus 2023.

Deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN tersebut, secara tidak langsung menggenapi kekuasaan Prabowo sebagai capres 2024. Karena, perahu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang ditumpangi Menteri Pertahanan itu dinaungi Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan PAN yang kesemuanya merupakan kelompok pendukung pemerintahan Presiden Jokowi untuk periode kedua.

Sementara, PDIP yang menjadi pengusung utama Presiden Jokowi justru

buat gerbong sendiri untuk mengikuti Pilpres 2024 dengan mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai capresnya. Tetapi sayangnya, dukungan yang didapat gerbong ini hanya dari satu parpol parlemen, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menariknya, di hari yang sama dengan deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN ke Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo menyambangi kediaman istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid, di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Fenomena politik tersebut, dinilai Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an, sebagai tanda genderang perang antara dua kubu koalisi Presiden Jokowi tersebut dimulai. Sebabnya, pertarungan kemenangan Pilpres 2024 kini ada pada penguasaan wilayah potensial seperti Jawa Timur.

“Dua capres ini sama-sama punya saham premium, yaitu Prabowo punya saham premium di Jawa Barat, suaranya saya rasa paling banyak. Kemudian Ganjar di Jawa Tengah. Tinggal di Jawa Timur (belum dikuasai salah satu kandidat capres itu),” ujar Ali kepada Info Indonesia, Kamis, 18 Agustus 2023.

Kandidat doktoral politik Universitas Indonesia (UI) itu mengamati, dua kandidat capres itu akan mencari cara menguasai suara warga Jawa Timur. Sehingga, dalam konteks pertarungan Ganjar dan Prabowo, wilayah Jawa Timur merupakan kunci kemenangan salah satu di antara mereka di Pilpres 2024. “Jawa Timur itu sangat menentukan dalam peta elektoral ke depan. Sehingga, tokoh-tokoh dari Jawa Timur perlu dilirik,” tutur Ali.

Mengamati peta politik sekarang ini, Ali me-

mandang Ganjar maupun Prabowo masih berpotensi menguasai ceruk suara warga di Jawa Timur, yang sebagian besar berasal dari organisasi massa (Ormas) Islam terbesar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU).

Dari peta koalisi Pilpres 2024 yang mewujud sekarang ini, Prabowo telah didukung PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar (Cak Imin) selaku tokoh NU di dalam gerbong KKIR. Sementara Ganjar, menurutnya, masih belum punya tokoh dari kelompok NU, mengingat PPP yang telah bergabung gerbong PDIP bukan murni partai warga Nahdliyin. Sebab, dalam sejarahnya, PPP merupakan hasil fusi 4 parpol yaitu Partai NU, Partai Masyumi, Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Perti.

“Kalau Prabowo sudah ada Cak Imin. persoalannya adalah bagaimana dengan Ganjar? Perlu juga kah menggaet tokoh Jawa Timur?” ucap Ali.

Realitas yang ada pada koalisi PDIP dan PPP tersebut, Ali meyakini Ganjar bakal mencari cara menggaet salah satu tokoh NU menjadi cawapres untuk merebut hati warga Jawa Timur. Bahkan, menurutnya, sudah ada satu sosok yang dilirik Ganjar, seperti Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, yang merupakan putri Presiden Gus Dur.

“Nah, kunjungan Ganjar ke kediaman istri Gus Dur beberapa waktu lalu juga bertemu Mbak Yenny. Itu dalam rangka mengimbangi posisi 08 (Prabowo) yang di sana sudah ada tokoh Jawa Timur, Cak Imin,” papar Ali.

Dia menyebutkan, hasil survei ASI beberapa waktu lalu menunjukkan posisi elektoral Prabowo di Jawa Timur memang lebih tinggi ketimbang Ganjar. Tetapi, dia mencatat margin of error di suara Prabowo masih

cukup tinggi, sehingga warga di wilayah Jawa Timur masih

potensi mengarahkan dukungan kepada Ganjar.

“Karena itu, saya sering membagi klaster cawapres mendatang itu menjadi tiga, dan itu yang potensial dilirik. Klaster pertama adalah cawapres dari kalangan Nahdliyin, karena kalangan Nahdliyin dianggap mampu memberikan efek insentif elektoral, karena NU adalah ormas terbesar di Indonesia. Bahkan, menurut data survei, populasi NU di Indonesia itu 49 persen dari total orang muslim di Indonesia,” urai Ali.

“Yang kedua adalah Cawapres klaster pengusaha, karena yang dibutuhkan adalah logistik. Jadi itu pertimbangan penting. Dan yang ketiga adalah cawapres dari kelompok muda. Karena kalau kita cek demografi dan DPT KPU 2024, di situ jumlah pemilih muda memang 52 persen atau 54 persen ya. Sehingga, tokoh muda dalam hal ini bisa mewakili kelompok muda,” sambungnya memaparkan.

Maka dari itu, Ali memandang Ganjar yang nampaknya terpentok perahu besar koalisi Prabowo memiliki peluang membalikkan keadaan apabila berhasil menggaet tokoh NU yang punya pengaruh tinggi dalam mempengaruhi warga Jawa Timur.

“Dari sisi kultur dan trah, Mbak Yenny itu sangat kuat. Punya darah biru pewaris Gus Dur,” tutup Ali.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, berpandangan bahwa Yenny Wahid cocok disandingkan dengan Ganjar Pranowo. Menurutnya, pertemuan antara Yenny Wahid dan Ganjar di Ciganjur semakin mencerminkan kecocokan keduanya.

“Yenny cocok dengan Ganjar. Satu sisi PDIP bisa lakukan kampanye dengan tema dukungan Nahdliyin melalui Yenny,” kata Dedi, Senin, 14 Agustus 2023.

Apalagi, menurutnya, Yenny tidak memerlukan modal elektabilitas mengingat PDIP sudah cukup besar sebagai partai politik pemenang Pemilu. Selain itu, PDIP juga memiliki keleluasaan menentukan bakal cawapres tanpa ada intervensi dari partai manapun.

Ditambah lagi, Yenny Wahid tidak masuk kategori tokoh potensial disandingkan dengan bakal capres lain, misalnya Anies Baswedan. “Mengingat Koalisi Perubahan perlu dukungan cawapres yang bisa solidkan koalisi, juga punya modal elektabilitas,” ujarnya.

Dedi mengungkapkan, jika Ganjar berpasangan Yenny Wahid bakal menguntungkan banyak pihak di luar koalisi. Bagi Prabowo Subianto dan Anies, misalnya, kedua bakal capres tersebut justru lebih diuntungkan dengan kehadiran duet Ganjar-Yenny.

“Karena mereka melawan kandidat yang tidak kokoh. Bagi PDIP sendiri diuntungkan karena tidak perlu berseteru dengan partai lain,” kata Dedi. ●RDO





“Harus hati-hati karena kalau sampai Demokrat ngambek, koalisi itu enggak akan bisa mendaftar Pilpres”

Surokim Abdussalam

PDIP PILIH AHY ANIES TINGGAL KENANGAN

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), diisukan masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo.

Di sisi lain, Partai Demokrat juga tengah berupaya agar AHY bisa mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kendati begitu, peluang AHY untuk mendampingi Anies juga masih kecil. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu saat ini tengah melakukan safari ke beberapa tokoh politik, seperti putri Gus Dur, Yenny Wahid; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, untuk digaet menjadi cawapres. Nampaknya, peluang AHY cukup sulit untuk dampingi Anies.

Sebaliknya, peluang AHY untuk jadi cawapres Ganjar terbuka cukup lebar. AHY hanya bersaing dengan kader PPP yakni Sandiaga Uno. Dilihat dari elektabilitas pun, AHY lebih tinggi dibandingkan dengan Sandiaga Uno.

Deputi Strategis dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan A Harahap, mengatakan, sebagai kader Partai Demokrat pasti menginginkan ketua umumnya maju di Pilpres 2024.

“Itu sesuatu hal yang wajar. Pastilah setiap kader menginginkan ketumnya ataupun partai tersebut menjadi pemimpin negeri ini,” katanya kepada Info Indonesia, Rabu, 16 Agustus 2023.

Yan mengaku sangat senang jika sang ketum masuk bursa cawapres Ganjar Pranowo. Kata Yan, AHY merupakan sosok sangat ideal untuk dipasangkan dengan siapapun.

“Ya tentu kami berterima kasih jika ketum kami Mas AHY dianggap salah satu kandidat yang memang bisa mendampingi Mas Ganjar,” jelas Yan.

Kendati begitu, Yan menyampaikan bahwa saat ini Partai Demokrat masih fokus dengan Koalisi Perubahan. Dia meyakini, Partai Demokrat masih sangat percaya Koalisi Perubahan dapat memenangkan Pilpres mendatang.

“Belum ada sedikitpun keraguan bagi Partai Demokrat untuk tetap bersama dengan Koalisi Perubahan,” terang Yan.

Dia mengatakan, mengenai cawapres Anies Baswedan, Partai Demokrat menekankan bahwa harus merujuk pada piagam koalisi. Sebab, dalam piagam tersebut sudah diatur

terkait dengan kriteria cawapres dari Koalisi Perubahan.

“Selama dalam piagam kesepakatan itu sudah dijalankan dengan baik, tentu semua partai yang tergabung di Koalisi Perubahan itu harus menaatinya,” imbuhan Yan.

Jadi, ketika PDIP memberikan tawaran kepada Partai Demokrat agar AHY menjadi cawapres Ganjar, hal itu sulit untuk terwujud. Sebab, Partai Demokrat saat ini masih menjalin kerja sama dengan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024.

“Belum bisa kami jawab, karena saat ini kami sedang menjalin hubungan yang baik dengan Koalisi Perubahan,” tutur Yan.

Sementara itu, analisis politik dari Citra Institute, Efriza, menilai, PDIP kehilangan sosok Erick Thohir yang digadang-gadang bakal menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Sebab, PAN sudah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto.

Melihat peta politik yang saat ini terjadi, PDIP pastinya akan lebih memilih untuk menggembosi dukungan partai dari Koalisi Perubahan. Kemungkinan besar, PDIP akan memberikan tawaran yang menjanjikan kepada Partai Demokrat. Setidaknya, PDIP bisa memberikan kursi cawapres kepada AHY.

Diketahui pula, hubungan antara PDIP dan Partai Demokrat semakin membaik pasca pertemuan AHY dengan Puan Maharani beberapa waktu lalu. Bahkan, Puan secara terbuka menyatakan bahwa AHY masuk lima besar bursa cawapres PDIP.

“Wajar PDIP berusaha membangun komunikasi kepada Partai Demokrat, sudah terjadi komunikasi dan berusaha saling melupakan konflik masa lalu. Ini tampak dari sekitar dua pertemuan Puan dan AHY,” jelas Efriza kepada Info Indonesia.

Dia memprediksi bahwa Partai Demokrat akan menerima tawaran dari PDIP. Sehingga, Partai Demokrat hijrah ke Koalisi PDIP dan meninggalkan Koalisi Perubahan. Dampaknya, pencapresan Anies Baswedan kemungkinan besar gagal.

Partai Demokrat dan AHY juga

disinyalir mengindikasikan mempertimbangkan tawaran dari kubu lain (PDIP), dengan selalu mengancam akan meninggalkan kubu KPP jika AHY tidak cawapres Anies. Tentu saja, tawaran bersama Ganjar diperhitungkan benar oleh Partai Demokrat dan AHY,” kata Efriza.

Dia menilai, jika Partai Demokrat mencari kemenangan di Pilpres 2024, maka AHY harus menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Peluang menang pun lebih besar bersama Ganjar ketimbang dengan Anies Baswedan.

“Duet ini lebih menjanjikan ketimbang mendukung Anies. Tapi peluang kalahnya lebih besar jika duet Anies-AHY. Melihat posisi Anies yang buncit dalam survei elektabilitas. Jika PDIP-Partai Demokrat dapat bersama, akan menjadi pasangan yang

menjanjikan bagi negeri ini. Cukup diperhitungkan karena kebijakan berkelanjutan bisa terwujud di era reformasi dari dua periode SBY dan dua periode Jokowi,” beber Efriza.

Dia mengatakan, duet Ganjar-AHY bisa menjadi lawan yang tangguh untuk menghadapi duet Prabowo-Erick Thohir di Pilpres 2024. Duet Ganjar-AHY bisa langsung menang dua putaran jika Pilpres ada tiga pasangan calon.

“Tentu saja, Ganjar-AHY menjadi lawananding yang menarik jika Prabowo-Erick,” jelas Efriza.

Di sisi lain, peneliti politik dari Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mengatakan, Koalisi Perubahan terutama Anies Baswedan tidak boleh memandang Partai Demokrat sebelah mata. Partai Demokrat memiliki peranan yang sangat vital di Koalisi Perubahan.

“Harus hati-hati karena kalau sampai Demokrat ngambek koalisi itu enggak akan bisa mendaftar Pilpres,” tegas Surokim.

Dia menyampaikan, jika Anies dan Partai NasDem menolak Partai Demokrat untuk mengisi kursi cawapres, maka harus ada kompensasi yang setimpal bila Koalisi Perubahan menang Pilpres.

“Harus disampaikan dengan super hati-hati dengan kompensasi yang tidak menyinggung Demokrat. Kompensasi itu harus bisa disampaikan dengan cara terhormat. Sehingga, Demokrat akan bertahan dan mendukung Koalisi Perubahan,” ujar Surokim.

Dia meyakini, Partai Demokrat akan tetap bertahan di Koalisi Perubahan. Sebab, Koalisi Perubahan pastinya akan memberikan posisi yang sangat strategis bagi AHY nantinya.

“Saya masih meyakini bahwa Demokrat masih punya tempat terbaik di koalisi, tidak harus dengan posisi wapres,” pungkas Surokim. ●RDO



“Tak ada rumus jitu kecuali bertemu masyarakat semaksimal yang kita bisa, dengan mata bertemu mata, tangan berjabat tangan, agar masyarakat Dapil Sumut I dapat mengenali calegnya secara langsung”

Yan A Harahap



DUKUNGAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JADI PENENTU

Pemilihan Umum yang diadakan secara serentak menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh bakal calon legislatif, mulai dari tingkat DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Pemilihan Umum yang diadakan secara serentak menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh bakal calon legislatif, mulai dari tingkat DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Jangka waktu kampanye yang begitu pendek, yakni hanya 75 hari, membuat seluruh bakal caleg harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan perhatian konstituen di daerah pemilihan, salah satunya Yan A Harahap.

Yan merupakan bakal caleg dari Partai Demokrat yang akan bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Dia maju sebagai bakal caleg dari Dapil Sumatera Utara I yang meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi.

Selama masa sosialisasi ini, dirinya mengaku sering sekali mengunjungi dapil. Dia meyakini dengan sering turun ke dapil, masyarakat akan semakin dekat dengan caleg-calegnya. Dia memastikan mendekati hari pencoblosan dirinya akan semakin rutin turun ke dapil.

“Sudah mulai rutin. Yang tadinya sekali sebulan, kini hampir, dua kali seminggu, sudah rutin turun. Tentu, nanti makin mendekat hari pencoblosan akan semakin intens turun ke dapil,” kata Yan kepada Info Indonesia, Rabu, 16 Agustus 2023.

Dia mengatakan, masyarakat di dapilnya sangat menyambut baik ketika mengetahui dirinya bakal maju sebagai wakil rakyat di Pileg 2024. Respons masyarakat yang ia temui selama ini sangat positif.

“Alhamdulillah beberapa kelompok masyarakat yang saya temui memberi respons yang positif begitu mengetahui bahwa saya akan maju berkontestasi di Pileg 2024 ini untuk DPR RI,” jelas Yan.

Tidak hanya itu, teman dan sahabat di masa sekolah pun sangat mendukung dirinya untuk maju sebagai caleg. Bahkan, teman dan sahabatnya sangat gembira dan mendukung penuh langkahnya untuk melenggang ke Senayan.

“Apalagi teman dan sahabat saya yang dulu bersama sekolah di SMA Negeri 3 Medan begitu bersemangat mendukung karena ada teman se-alumni yang maju DPR RI,” terang Yan.

“Selain itu, sahabat-sahabat lama saya yang sekarang berdomisili di Medan dan sekitarnya juga terus memberi semangat agar saya terpilih kelak menjadi anggota

DPR RI. Saudara-saudara saya dan teman masa kecil yang sekarang tinggal di Medan dan sekitarnya selalu memberi support kepada saya,” tambah Yan.

Dia menceritakan pengalamannya ketika turun ke dapil. Kata Yan, masyarakat selalu menyampaikan aspirasi kepada dirinya. Aspirasi itu tidak lepas dengan konsep perubahan dan perbaikan yang selalu digaungkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Tentu tak lepas dari konsep perubahan & perbaikan yang sudah sering digaungkan oleh ketum kami Mas AHY,” kata Yan.

Selain itu, dirinya juga memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait alasannya maju sebagai bakal caleg. Dia mengaku ingin mensejahterakan masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di dapilnya.

“Disamping itu, tentu jika terpilih, menggiring anggaran untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Dapil Sumut I,” tutur Yan.

Dia pun menyadari setiap daerah pemilihan memiliki psikologis yang berbeda. Kendati begitu, dirinya memastikan akan mendekatkan diri kepada pemilihnya.

Sebab, kedekatan caleg dengan pemilih terjadi jika sering bertemu.

“Tak ada rumus jitu kecuali bertemu masyarakat semaksimal yang kita bisa, dengan mata bertemu mata, tangan berjabat tangan, agar masyarakat Dapil Sumut I dapat mengenali calegnya secara langsung,” terang Yan.

Dia menyampaikan, ada beberapa tantangan setiap caleg yang mengikuti kontestasi Pileg 2024.

Kata Yan, tantangan utama bagi caleg adalah mengenai ongkos politik. Sebab, seluruh kegiatan caleg ini menyangkut dengan ongkos politik.

“Meskipun bukan sebagai variabel yang utama, beban yang harus dihadapi adalah soal ongkos politik, anggaran kampanye untuk so-

sialisasi, hingga persaingan popularitas,” jelas Yan.

Yan menambahkan, caleg yang memiliki ongkos politik cukup besar tidak dapat dipastikan lolos ke Senayan. Sebab, ongkos politik itu bukan menjadi penentu utama seorang caleg itu bisa menjadi wakil rakyat di parlemen. Menurutnya, penentu caleg itu bisa melenggang ada suara dari masyarakat. Makanya sangat penting bagi caleg untuk mendekat diri kepada pemilihnya.

“Walau pada kenyataannya tidak semua caleg yang memiliki anggaran yang besar bisa lolos ke DPR,” kata Yan.

Dia mengaku sudah menyiapkan beberapa strategi khusus untuk menjawab segala tantangan yang bakal dihadapi. Selain itu, kunci utama keberhasilan dari caleg adalah mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

“Kreativitas dan pendekatan diri ke calon pemilih bisa juga menjadi penentu. Yang penting ikhtiar semaksimalnya, sisanya serahkan pada Allah,” tutur Yan.

Selain mendapatkan dukungan dari masyarakat, peran keluarga juga sangat penting. Kata Yan, dukungan keluarga sangat berpengaruh. Dia mengaku niatnya untuk maju sebagai caleg didukung penuh oleh keluarga besarnya, terutama Istri dan anak-anaknya.

“Alhamdulillah saya didukung oleh keluarga besar saya, terutama oleh istri dan anak saya tercinta,” kata Yan.

Dia mengaku istri dan anak-anaknya selalu memanjatkan doa untuk dirinya agar diberi kemudahan untuk mewujudkan keinginannya maju sebagai wakil rakyat. Tidak hanya itu, dia pun juga berjanji akan bertanggung jawab dan amanah jika terpilih menjadi caleg DPR periode 2024-2029.

“Setiap malam sebelum tidur mereka selalu mendoakan, jika memang Allah meridhoi, saya bisa terpilih menjadi anggota DPR RI, dapat mewakili konstituennya di parlemen, menjadi anggota dewan yang amanah, dan berjuang di jalan Allah SWT,” pungkas Yan. •RDO





“Saya ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa memberikan sumbangsih dan kontribusi untuk kemajuan daerah dan masyarakat”

Fitriana

URUS SYARAT ASAL-ASALAN, BANYAK CALEG BERGUGURAN

Banyaknya syarat yang harus dipenuhi membuat beberapa partai politik kesulitan mencari kadernya untuk dijadikan sebagai bakal calon anggota legislatif. Perekrutan yang asal-asalan malah membuat sebagian bakal caleg gugur karena tidak memenuhi syarat.

Banyaknya syarat yang harus dipenuhi membuat beberapa partai politik kesulitan mencari kadernya untuk dijadikan sebagai bakal calon anggota legislatif. Perekrutan yang asal-asalan malah membuat sebagian bakal caleg gugur karena tidak memenuhi syarat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan telah mengkonfirmasi bahwa ada ratusan bakal caleg yang berguguran karena gagal memenuhi persyaratan yang diminta. Banyaknya bakal caleg yang gagal itu diduga karena perekrutan yang asal-asalan.

Beberapa bakal caleg DPRD Sumsel mengaku yakin lolos di Daftar Calon Sementara (DCS) karena telah memenuhi berbagai persyaratan yang diminta. Hal itu seperti yang diungkapkan bakal caleg DPRD Sumsel dari Partai Nasdem, Zain Ismed, yang merasa yakin lolos DCS karena sudah melengkapi persyaratan diminta.

Dalam perekrutan itu mereka dibantu dan dibimbing langsung partai, sehingga tidak kesulitan memenuhi syarat.

“Untuk perekrutan di Partai Nasdem Sumsel, alhamdulillah lancar dan tidak ada masalah. Di Partai Nasdem tidak terlalu sulit lah mendapatkan kader. Bahkan sebelum masuk bakal caleg kami harus mengikuti seleksi dulu, dilihat track record. Jadi benar-benar harus siap,” ujar bakal caleg DPRD Sumsel dari daerah pemilihan 6 yang meliputi Kota Prabumulih, Kabupaten PALI, dan Kabupaten Muara Enim.

Ketua Dewan Kopi Indonesia (Dekopi) Sumsel ini mengaku, banyak bakal caleg yang enggan memenuhi berbagai persyaratan yang diminta partai sesuai arahan KPU. Bagi mereka yang tidak siap tentu hal tersebut merepotkan.

Menurutnya, di Partai Nasdem, mereka diorganisir dengan baik, sehingga sebelumnya sudah diminta untuk siap menjadi bakal caleg. Bahkan, mereka juga sudah dibina untuk penempatan wilayah masing-masing sesuai dengan potensi dan peluang yang dimiliki.

“Sehingga meski tempa t

tinggal saya di Palembang, namun saya banyak berhubungan dengan petani kopi, makanya saya diminta untuk masuk Dapil 6,” jelasnya.

Bagi Partai Nasdem, kata dia, memenuhi kuota minimal 75 bakal caleg tidak terlalu sulit karena banyaknya kader. Namun, bagi sebagian partai lain, kuota ini cukup besar.

Sikap optimis yang sama juga disampaikan bakal caleg DPRD Sumsel dari PBB, Fitriana. Perempuan yang akrab disapa Pingky ini akan maju sebagai bakal caleg dari Dapil Sumsel I yang meliputi Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Gandus, Kertapati,

Seberang Ulu 1, Jakabaring, Seberang Ulu 2 dan Plaju.

Sebagai salah seorang bakal caleg perempuan, Fitriana mengungkapkan, kehadirannya bisa menjadi bukti jika perempuan juga bisa ikut terlibat aktif dalam panggung politik yang diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat yang positif bagi masyarakat, khususnya untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Sumatera Selatan.

“Saya ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa memberikan sumbangsih dan kontribusi untuk kemajuan daerah dan masyarakat. Saya akan memperjuangkan hak perempuan karena angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi, miris memang,” ungkapnya.

“Potensi kita cukup memadai, hanya perlu ruang saja, semoga nanti saya bisa memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, khususnya untuk kaum perempuan,” sambungnya.

Pingky menjelaskan, untuk PBB di Dapil Sumsel I ada 6 orang bakal caleg, di mana tiga di antaranya adalah perempuan termasuk dirinya.

Selain bakal caleg dari Dapil I, Pingky juga merupakan Bendahara Umum DPP Pro Prabowo Subianto (Propas) wilayah Sumsel. Dirinya berharap dengan kerja sama seluruh pengurus Propas Sumsel, bukan hal yang mustahil jika Prabowo Subianto akan kembali menang di Sumsel.

“Mengapa saya bergabung menjadi relawan Propas? Karena PBB merupakan salah satu partai pendukung agar Prabowo di Pemilu 2024 bisa menjadi Presiden periode 2024-2029,” tuturnya. ●RDR



Sulut Rawan Politik Uang, Caleg Terpilih Tak Berkualitas

Sulawesi Utara masuk dalam lima besar provinsi paling rawan praktik politik uang di Pemilu 2024. Hal itu berdasarkan hasil analisis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal isu strategis politik uang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024.

Dari 34 provinsi yang dijadikan unit analisis, lima provinsi yang rawan yakni Maluku Utara dengan skor tertinggi 100, disusul Lampung (55,56), Jawa Barat (50), Banten (44,44), dan Sulawesi Utara (38,89).

“Saya berharap hasil Bawaslu ini dijadikan bahan mitigasi atau pencegahan sejak saat ini,

baik oleh Bawaslu daerah, kepolisian, pemerintah daerah dan parpol sendiri,” kata Dosen Kepemiluan FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado, Ferry Daud Liando, Senin, 14 Agustus 2023.

Ferry mengatakan, jika permainan politik uang tidak dicegah, maka pelaksanaan pemilu di Sulut tidak akan berhasil memilih anggota DPR, DPRD dan DPD yang berkualitas dan berintegritas.

“Jika faktor uang menjadi penentu pemilih dalam memilih calon, maka potensi besar yang akan terjadi adalah terpilihnya calon yang tidak berkualitas,” ujarnya.

M e n u -

rutnya, keterpilihan calon karena uang dapat diartikan pemilih mengabaikan syarat kualitas calon. Jika para calon lebih mengutamakan main uang untuk beli suara, maka secara otomatis integritasnya diragukan.

“Kan tidak mungkin caleg akan main uang jika ia memiliki integritas atau moralitas yang baik,” terang dia.

Kendati pengumuman Bawaslu itu sifatnya baru potensi atau rawan, namun belum tentu apa yang disampaikan akan benar-benar terjadi. Meski demikian, penyampaian Bawaslu itu harus diwaspadai. Jika tidak dicegah mulai sekarang, maka bisa saja permainan jual beli suara itu akan lebih parah.

Bawaslu Sulut harus segera merumuskan road map strategi pencegahan. Pertama, mengiden-

tifikasi modus-modus permainan uang.

“Siapa pelaku yang paling rawan melakukan itu, siapa pihak-pihak yang paling rawan menjadi target sasaran pembelian suara,” ujarnya.

Menurut Ferry, hasil identifikasi itu dapat dijadikan bahan untuk penyusunan strategi pencegahan.

Kedua, Bawaslu perlu memperkuat kelembagaan pengawasan melalui penguatan kapasitas pengawas. Ketiga, mereka juga perlu melakukan kolaborasi pencegahan bersama pemerintah daerah, kepolisian, tokoh-tokoh agama serta kepada parpol.

Keempat, perlu mengintensifkan sosialisasi dan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat soal bahaya jika pemilih menerima uang dari calon. ●RDO



“Saya yakin, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan pemberitaan miring dari para capres karena pemilih rasional sudah meningkat, walaupun masih ada pemilih tradisional dan emosional yang akan berdampak”

Andries Lionardo



DAFTAR CALON SEMENTARA AKAN MEMBUKA KASUS LAMA

Ada saja kasus-kasus lama hingga isu miring dari para partai politik yang kembali mencuat ke permukaan jelang Pemilu 2024 di berbagai daerah pemilihan. Kasus tersebut diduga bisa mengganggu elektabilitas hingga popularitas parpol dan kader-kadernya yang akan melenggang di pesta demokrasi tahun depan.

Masyarakat kembali diingatkan dengan kasus suap yang menyeret mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dan politisi PDIP Harun Masiku pada 2020.

Kasus itu berawal dari caleg PDIP Dapil Sumsel I, Nazaruddin Kiemas, yang meninggal dunia jelang pencoblosan Pileg 2024. Posisi Nazaruddin langsung digantikan oleh Riezky Aprilia, peraih suara terbanyak kedua dari PDIP setelah Nazaruddin.

Tapi, DPP PDIP mencalonkan Harun Masiku, peraih suara di urutan kelima, sedangkan KPU masih ngotot memenangkan Riezky Aprilia. Agar bisa melenggang dengan mudah ke DPR, Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan sebesar Rp900 juta untuk mengganti nama Riezky Aprilia menjadi namanya.

Aksi suap itu akhirnya terendus oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Namun, hanya Wahyu Setiawan yang berhasil diamankan dan akhirnya divonis 6 tahun penjara. Sedangkan, Harun Masiku menghilang tanpa jejak hingga saat ini.

Masih di PDIP, Ganjar Pranowo dimajukan untuk menjadi Capres 2024. Namun, ada juga kasus-kasus lama yang menyeret nama Gubernur Jawa Tengah ini karena tersandung konflik agraria, yakni di kawasan Kendeng. Kelompok Kartini Kendeng menyuarati Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2021 agar mencabut izin pertambangan semen di daerahnya. Mereka menuding Ganjar Pranowo memberi izin pembukaan puluhan tambang di Pegunungan Kendeng.

Konflik agraria lainnya yakni pengusuran warga Desa Wadas di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Pemerintah merancang pembangunan Bendungan Bener yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan memasok sebagian besar kebutuhan air ke Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo.

Proyek besar itu membutuhkan batuan andesit sebagai material pembangunan yang ada di Desa Wadas. Penambangan batu andesit seluas 145 hektare itu dinilai merusak sumber-sumber mata air, lahan pertanian, rawan longsor dan mengancam mata pencaharian warga.

Tak hanya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto yang mencalonkan diri sebagai capres juga selalu dihantui isu pelanggaran HAM berat di tahun 1997-1998.

Puluhan mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk Keadilan Korban Penghilangan Paksa, terus menyuarakan kasus hilangnya para aktivis Indonesia di tahun 1997-1998. Prabowo Subianto yang diduga menjadi dalang utama.

Apalagi saat itu, Prabowo Subianto dikeluarkan oleh ABRI, karena bertanggung jawab atas kasus penculikan bersama Tim Mawar yang dibentuk Kopassus. Namun hingga kini, Prabowo Subianto tidak dinyatakan bersalah atau disidang.

Capres lainnya yakni Anies Baswedan juga memiliki rekam jejak buruk selama berkiprah di dunia perpolitikan. Baru menjabat dua tahun sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Presiden Joko Widodo langsung memecat Anies Baswedan pada 2016. Posisinya digantikan oleh Ketua Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy.

Saat mencalonkan dari jadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kerap diisukan selalu membawa isu agama untuk menyerang lawannya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bahkan brigade Front Pembela Islam (FPI) pun menjadi pendukung Anies Baswedan.

Anies juga tersandung dugaan karus korupsi bansos DKI Jakarta sesuai tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu melihat ada kejanggalan dalam penyaluran bansos oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketiga yakni

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Anies Baswedan juga diseret dalam kasus dugaan korupsi proyek Formula E.

Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menuduh jika Anies menghamburkan dana hingga Rp1,1 triliun hanya untuk event Formula E. Bahkan, KPK memastikan masih terus mengusut dugaan korupsi pelaksanaan Formula E 2022 di DKI Jakarta.

Plt Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, berujar KPK tetap melakukan penyelidikan. Salah satu yang diminta keterangan tentang kasus tersebut yakni Anies Baswedan.

Menanggapi berbagai isu negatif yang kembali marak di daerah tersebut, kader PDIP memberikan klarifikasi. Bendahara PDIP Sumsel, Yudha Rinaldi, menegaskan, isu Harun Masiku saat ini tidak bisa disangkut-pautkan lagi dengan partai karena kasusnya sudah ditangani secara hukum. PDIP sendiri sudah menyerahkan ke aparat penegak hukum.

“Meski kasus itu (Harun Masiku) sengaja diangkat lagi, namun tidak mengganggu elektabilitas PDIP karena semuanya sudah kita serahkan ke penegak hukum dan kita juga tidak terlalu pusing dengan masalah ini,” tegas Yudha.

Demikian juga soal kampanye negatif terhadap Ganjar Pranowo yang diusung PDIP sebagai calon presiden. Mereka tidak akan ambil pusing dengan masalah tersebut.

“Bagi kami sekarang ini bagaimana memaksimalkan nilai positif dari seorang Ganjar Pranowo ke masyarakat. Ada banyak nilai positif yang belum tersampaikan ke masyarakat dan itu fokus kami sekarang,” ujarnya.

Ketua DPW Partai Nasdem, Sumatera Selatan, Herman Deru berujar jika menjadi hal biasa apabila berita-berita yang sudah lama sekali diangkat untuk menyerang capres, termasuk Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem.

“Kalau setiap ada kenaikan suhu politik, biasanya itu muncul berita lama sekali. Itu menjadi sesuatu yang harus ditanggapi dengan kedewasaan saja,” kata Gubernur Sumsel ini.

Dia juga tidak terlalu mempersoalkan terkait belum adanya iklan-iklan terkait promosi Anies menjadi capres di Pilpres 2024.

Mantan Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dua periode tersebut yakin jika masyarakat Sumsel sudah mengetahui sosok Anies Baswedan.

“Kalau kita sudah tahu, jika orang Sumsel ini sudah dewasa berpolitik. Jadi tidak perlu berlebihan-lebihan (promosi),” ujarnya.

Sementara itu, DPD Partai Golkar Sumsel yang telah menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan fokus dan mendukung penuh keputusan DPP yang telah menetapkan Ketua Partai Gerindra itu sebagai calon presiden.

Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Sumsel 2, Hilman, mengatakan, meski banyak isu negatif dilontarkan, namun mereka melihat Prabowo Subianto sebagai orang yang tepat memimpin Indonesia berikutnya. Apalagi, secara historis Prabowo dulunya kader Partai Golkar, sehingga ikatan ini sangat kuat dengan keluarga besar partai beringin.

Kemudian, secara ideologis Prabowo dan Partai Gerindra memiliki kesamaan dengan Partai Golkar sebagai partai tengah yang bisa mengakomodir lintas agama, suku, ras, profesi dan dapat diterima seluruh kalangan, baik pemilih tua maupun pemilih milenial. Untuk itu, Golkar akan memenangkan Prabowo di seluruh Dapil Sumsel.

Akademisi FISIP Universitas Sriwijaya (Unsri), Andries Lionardo, menuturkan, pengungkitan isu miring jelang Pilpres 2024 merupakan manajemen kampanye untuk pencitraan positif bagi kandidat lain.

Namun yang harus diingat, saat ini pengetahuan politik masyarakat Indonesia sudah cerdas dan tidak selalu bisa disisipi dengan komunikasi positif yang negatif. Karena tidak semua masyarakat langsung percaya dengan isu-isu miring tersebut.

Dibandingkan Pilpres 2024, Pilpres 2019 lebih parah dalam penyerapan isu-isu negatif. Dia merasakan, lima tahun lalu kondisi politik begitu panas dan isu-isu miring sangat mempengaruhi pemilih.

“Saya yakin, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan pemberitaan miring dari para capres karena pemilih rasional sudah meningkat, walaupun masih ada pemilih tradisional dan emosional yang akan berdampak,” ujarnya.

Dia juga menanggapi isu pelanggaran HAM yang selalu dikait-kaitkan dengan Prabowo Subianto dalam tragedi 1997-1998 yang kini dihembuskan lagi jelang Pilpres 2024. Namun, dia yakin pencitraan Prabowo saat ini sudah bagus, apalagi setelah menjadi Menteri Pertahanan bakal membuat isu itu kemungkinan terabaikan.

•RDR





“Sekarang warga lebih memikirkan perut kenyang dan kebutuhan hidup. Jadi lebih realistis ke sana, tidak lagi juga memikirkan atau terpikir soal memilih menggunakan hati nurani dan sebagainya”

Ade Indra Chaniago

MODAL TERKENAL SAJA TAK CUKUP

Duduk sebagai anggota dewan bisa jadi impian banyak orang. Sehingga tidak heran, ada jutaan orang berebut kursi anggota legislatif, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tertinggi di DPR RI.

Namun, ada berbagai syarat yang harus dilalui untuk memperebutkan kursi di Senayan. Mereka yang ikut pertarungan politik di pemilihan legislatif bukan orang sembarangan. Banyak di antara mereka merupakan publik figur, tokoh masyarakat, mantan pejabat, hingga orang kaya yang ingin menjajal politik.

Meski begitu, punya modal terkenal saja tidak cukup. Ada biaya yang harus dikeluarkan yang jumlahnya tidak sedikit. Nilainya bahkan sudah menyentuh miliaran rupiah.

Di sisi lain, ada juga di antara mereka ini yang memang mengandalkan modal seadanya namun meraih keberhasilan. Hanya saja untuk sekarang ini hal tersebut menjadi sesuatu yang langka.

Walaupun banyak di antara para calon anggota legislatif ini tidak mau terangterangan tentang biaya yang dikeluarkan, namun tetap saja nilainya bisa menyentuh hingga miliaran rupiah.

Menurut pengamat politik Ade Indra Chaniago, untuk menjadi anggota DPR RI, para caleg paling tidak mengeluarkan uang hingga Rp10 miliar. Dana itu biasanya digunakan untuk operasional tim pendukung, pemberian bantuan ke tiap daerah yang dikunjungi, serta pelaksanaan di hari pencoblosan.

Sementara, untuk anggota DPRD tingkat provinsi setidaknya butuh dana Rp3 miliar. Sedangkan, untuk tingkatan DPRD kabupaten/kota, biaya operasional yang dibutuhkan bisa mencapai Rp2 miliar.

“Kira-kira seperti itu. Tetapi yang saya sebutkan, jelas itu dana kampanye menggunakan politik uang (money politic),” ungkap Ade.

Menurutnya, dana kampanye itu ada dua macam, yakni cost politic atau biaya operasional kegiatan dan money politic.

Dia menyebut, uang dana kampanye cost politic diperbolehkan karena bukan bertujuan dan bermaksud untuk membeli suara rakyat.

“Cost politic itu untuk biaya makan, ongkos minyak, dan sebagainya. Itu sah-sah saja apabila kita memberikan

itu kepada seseorang atau kelompok organisasi di dalam politik karena kita ada agenda politik dengannya. Tetapi kalau money politic memberikan uang lebih dari batasannya dari biaya makan atau ganti ongkos minyak. Tujuannya jelas untuk membeli suara,” paparnya.

Dia mengungkapkan, budaya politik uang saat ini seperti sudah mendarah daging. Sebab, caleg maupun masyarakat pada posisi sama-sama butuh. Sehingga, sudah sulit di masyarakat sekarang yang memilih dengan hati nurani atau menjunjung tinggi demokrasi.

Ade mengatakan, demokrasi hanya terwujud di era Yunani kuno. Lalu, Yunani kuno itu pun sudah hancur karena kalah perang melawan Sparta. Setelah itu tidak ada lagi yang namanya demokrasi dan hati nurani di dunia ini, khususnya politik.

“Sekarang warga lebih memikirkan perut kenyang dan kebutuhan hidup. Jadi lebih realistis ke sana tidak lagi juga memikirkan atau terpikir soal memilih menggunakan hati nurani dan sebagainya. Terlebih lagi masyarakat tidak memiliki pemahaman soal politik,” jelasnya.

Dia mengakui, pemahaman terhadap demokrasi berpolitik atau memilih dengan hati nurani bisa saja dilakukan di Indonesia. Namun, itu harus dilakukan dengan pemerintah memberikan pemahaman politik kepada rakyatnya. Pemerintah harus memberikan tugas kepada partai politik untuk memberikan pemahaman itu kepada rakyat.

Ade menyebutkan pendidikan politik kepada rakyat adalah tugas parpol. Namun, parpol sendiri terkesan tidak mau memberikan edukasi karena khawatir tidak akan terpilih lagi ke depannya.

“Karena mereka juga senang dengan kondisi sekarang. Kalau rakyat sudah semuanya pintar berpolitik, tidak ada calon-calon yang bisa berkampanye menggunakan uang. Semua rakyat berpolitik dan paham politik mereka yang menggunakan politik uang tidak akan dipilih lagi. Kondisi ini seakan-akan memang sudah dibentuk, diciptakan, dan dijaga biarlah seperti ini saja selamanya,” paparnya.

Pesta demokrasi di Indonesia memang tidak bisa lepas dari uang. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sumsel, Febuar Rahman, mengatakan, dana kampanye jelas sangat dibutuhkan dengan jumlah yang besar.

“Mencalonkan diri ke eksekutif dan legislatif tentunya membutuhkan dana yang cukup besar. Terlebih lagi kalau dia calon yang belum dikenal, butuh dana transportasi dan bertemu konstituen,” kata dia.

Secara kelembagaan, kata Febuar, Partai Perindo tidak pernah meminta uang alias tanpa dipungut biaya. Namun kalau calon kepala daerah yang ingin maju, mereka pastinya harus mengeluarkan dana kampanye sendiri.

“Tetapi untuk jumlahnya itu relatif, ada yang tinggi, ada juga yang tidak sampai tinggi. Bisa Rp5-10 miliar tetapi semua relatif. Semuanya tergantung komunikasi kita dengan masyarakat saja,” terangnya.

Sementara beberapa bakal calon legislatif juga mengakui kalau biaya yang mereka keluarkan tidak sedikit. Sementara soal hasil mereka juga tidak bisa memprediksi apakah sesuai harapan atau tidak.

“Kalau sampai miliaran rasanya tidak karena tidak ada uangnya. Yah paling sekitar Rp300-500 jutaan lah. Untuk hasil, saya tetap usaha dan dibantu teman-teman,” ungkap salah satu bakal caleg dari Partai Gerindra, Permana.

Mantan Kepala Dinas Perdagangan Sumatera Selatan ini mengungkapkan, niatnya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif adalah untuk terus bisa menyalurkan semua potensi yang dimiliki. Saat menjadi ASN dulu bisa lewat jalur eksekutif dan saat pensiun melalui jalur legislatif.

Hal yang sama juga dikatakan Zain Ismed, mantan pensiunan BUMN yang kini aktif sebagai Ketua Dewan Kopi Indonesia (Dekopi) Sumsel. Di Pileg kali ini, Zain Ismed mencoba peruntungan sebagai bakal caleg DPRD Sumsel dari Dapil 6.

Dana yang terbatas membuat Zain Ismed tidak berani pasang target tinggi. Namun, dia tetap berharap penuh bisa lolos sebagai anggota DPRD Sumsel.

“Untuk biaya aku tidak berani ngomong ya karena kecil. Konstituen saya paling para petani kopi dan lainnya yang ada di wilayah Semendo Muara Enim. Pokoknya tidak besar lah, tapi kita tentu tetap berusaha sesuai kemampuan dan kapasitasnya,” ucapnya. ●RDR



“Saya katakan sulit untuk Herman Deru mempertahankan masa jabatannya pada periode kedua karena dia tidak berbasis kinerja, namun berbasis popularitas dan pencitraan”

Bagindo Togar



HERMAN DERU TERANCAM GAGAL DUA PERIODE

Herman Deru resmi diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur Sumatera Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Namun, perjalanan Herman Deru kembali menjadi orang nomor satu di Sumsel akan sangat berat. Pasalnya, akan banyak penantang kuat sebagai kandidat calon gubernur Sumsel 2024.

Beberapa penantang kuat tersebut yakni mantan Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra, mantan Wakil Gubernur Sumsel 2013-2018 Ishak Mekki, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Heri Amalindo, hingga Wali Kota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe.

Nama-nama tersebut bukanlah orang baru di dunia politik, bahkan kinerja mereka juga sudah dibuktikan dan dirasakan oleh warga Sumsel.

Pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar, mengungkapkan, tidak sulit mengalahkan Herman Deru pada Pilgub Sumsel 2024. Sebab, lawan yang akan dihadapi oleh petahana sudah

memiliki banyak pengalaman.

“Contoh Partai Gerindra men-calonkan Eddy Santana Putra, PDIP juga majukan Heri Amalindo. Jika dilihat semua memiliki pengalaman di dunia politik,” kata Bagindo Togar.

Bagindo Togar menuturkan, tidak mudah bagi Herman Deru mengata-kan bahwa lawan dalam Pilgub Sumsel 2024 tidak sepadan dengan dia.

Dalam strategi politik, mengetahui siapa lawan saat berhadapan dengan kandidat yang ber-

galaman akan membutuhkan kekuatan dua kali lipat lebih besar.

“Dibutuhkan kekuatan dua kali lipat lebih besar atau jurus dan kekuatan untuk mengalahkan pertahanan lawan,” katanya.

Apalagi, selama menjabat sebagai gubernur Sumsel, Herman Deru tidak mengandalkan kinerja dalam membangun popularitas sebagai pemimpin.

“Herman Deru tidak mengandalkan kinerja, jika mengandalkan kinerja kemungkinan akan sulit dikalahkan. Tapi kalau cuma mengandalkan popularitas, maka tidak sulit mengalahkan tokoh yang hanya mengandalkan pencitraan,” katanya.

Dalam segi kinerja, masyarakat tentunya menginginkan perubahan yang lebih baik dari pada pemimpin sebelumnya.

“Maaf lah ya, kecuali zaman Herman Deru jauh lebih baik dari zaman Alex Noerdin mungkin masyarakat tetap mau pada eranya Herman Deru,” ungkapnya.

Menurut Bagindo Togar, saat ini masyarakat lebih merindukan zaman Alex Noerdin soal pendidikan, sekolah gratis, pembangunan, infrastruktur yang pesat dan banyak terobosan-terobosan.

“Ada pembangunan zaman Herman Deru tapi tolok ukurnya masih standar, tidak ada yang luar biasa terobosan dan inovasinya. Contoh Tanjung Api-api masih mangkrak, diharapkan zaman beliau ada terobosan, namun ini tidak berjalan,” katanya.

Bagindo Togar berujar, sulit bagi Herman Deru untuk mendapatkan hati di masyarakat saat maju di Pilgub Sumsel 2024.

“Saya katakan sulit untuk Herman Deru mempertahankan masa jabatannya pada periode kedua karena dia tidak berbasis kinerja, namun berbasis popularitas dan pencitraan,” ungkapnya.

Kalau Herman Deru berbasis kinerja, kata

dia, maka sulit untuk mengalahkannya. “Coba tanyakan masyarakat adakan voting 150 responden, saya yakin 50 persen masyarakat pasti lebih mengakui pembangunan pada zaman Alex Noerdin. Sekarang masyarakat butuh perubahan yang lebih baik ke depan,” ulasnya.

Pengamat politik Sumsel dari Public Trust Institute (PUTIN), Fatkurohman, menambahkan, dengan partisipasi kembali pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya dalam Pilgub Sumsel 2024, pertarungan ini diprediksi akan menjadi sengit. Meskipun demikian, kompetisi ini tetap menarik dan ketat.

Dalam konteks peluang, terdapat beberapa langkah yang harus diambil oleh setiap kandidat yang ingin memenangkan Pilgub Sumsel 2024.

“Ini disebabkan oleh kemunculan calon yang masing-masing memiliki basis dukungan, sehingga belum ada yang dapat mendominasi wilayah secara keseluruhan. Meskipun pasangan HDMY kembali berkompetisi, peluang bagi kandidat lain tetap terbuka,” ungkap Fatkurohman.

Fatkurohman menjelaskan, jika HDMY benar-benar berpasangan kembali, hal ini akan menjadi tantangan bagi kompetitor lainnya. Ini mengingat pada Pilgub Sumsel 2018, pasangan ini hanya berhasil menang di empat kabupaten/kota, tetapi berhasil memenangkan secara keseluruhan.

Namun, belum tentu sejarah akan berulang. Bahkan, dinamika Pilgub Sumsel 2024 diperkirakan akan lebih sengit karena petahana tidak lagi menjabat dan ada rentang waktu lebih dari satu tahun sebelum pemilihan.

“Pertarungan untuk memengaruhi persepsi tentang keberhasilan dan kegagalan akan muncul dan menjadi sengit, terutama dalam era media sosial saat ini.

Jika oposisi ingin memenangkan, mereka harus dapat membuktikan kegagalan petahana dalam memimpin,” tambahnya.

Isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan infrastruktur tetap akan menjadi isu utama dalam Pilgub Sumsel 2024. Hal ini mirip dengan siklus Pilgub 2008, saat pemilihan gubernur pertama kali diadakan secara langsung.

“Kota Palembang akan menjadi wilayah yang sangat menentukan untuk kemenangan kandidat dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak. Jika oposisi terpecah, hal ini justru dapat menguntungkan petahana,” tambahnya.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sumsel memastikan bahwa mereka akan mengusung Herman Deru sebagai bakal calon gubernur Sumsel pada Pilkada 2024. Partai Nasdem memiliki sejumlah kriteria calon yang akan diusung yang ditentukan berdasarkan hasil survei yang dilakukan.

Sekretaris DPW Partai Nasdem Sumsel, Syamsul Bahri, menyatakan, untuk posisi calon gubernur Sumsel ke depan diputuskan Herman Deru akan kembali diusung.

“Untuk daerah-daerah yang memiliki potensi seperti Palembang, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Musi Rawas, dan sebagainya, kita akan menunggu hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) terlebih dahulu,” ujar Syamsul Bahri.

Dalam Pileg ini, Nasdem Sumsel memiliki target untuk mendapatkan satu kursi setiap daerah pemilihan, sehingga diharapkan dapat meraih posisi kepemimpinan DPRD, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

“Kami memiliki target minimal untuk mendapatkan pimpinan DPRD atau posisi Ketua DPRD. Dengan pencapaian tersebut, kami akan dapat mengusung kader-kader Nasdem dalam Pilkada,” ungkapnya. ● IRY





“Jika PDIP mengu-
sung Petrus Golose,
maka peluang untuk
meraih hatrck pasti
tercapai”

Royke Pangkey

KEPALA BNN DI PUSARAN PILGUB SULUT

**Nama Kepala Badan
Narkotika Nasional
(BNN), Komjen Pol Petrus
Reinhard Golose, men-
cuat dalam bursa calon
gubernur Sulawesi Utara
pada Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) 2024.**

Akademisi dari Universi-
tas Negeri Manado, Royke
Pangkey, mengungkapkan, sete-
lah berakhirnya kepemimpinan
Gubernur Olly Dondokambey yang merupa-
kan kader terbaik dari PDIP, partai tersebut
perlu mencari sosok yang memiliki kualitas
dan sifat positif yang bisa menginspirasi
orang lain untuk meraih kemenangan tiga
kali beruntun di Sulut.

“Seorang figur yang mampu menjadi te-
ladan bagi orang di sekitarnya melalui tin-
dakan, sikap, dan kata-kata mereka,” ujar
Royke.

Royke menjelaskan, perilaku yang baik,
seperti kejujuran, keramahan dan empati
terhadap sesama, dapat ditemukan pada
perwira tinggi Polri, yakni Komjen Petrus
Reinhard Golose.

Menurut Royke, kemenangan ketiga bagi
PDIP di Sulut dapat diwujudkan oleh Petrus
Golose.

“Jika PDIP mengukung Petrus Golose,
maka peluang untuk meraih hatrck pasti
tercapai. Petrus Golose adalah sosok yang
menghargai keragaman, memiliki integritas,
dan bertanggung jawab atas tindakannya,”
papar Royke.

Royke menyebutkan, calon pemimpin
yang baik memiliki kemampuan
untuk memotivasi orang lain,
memberikan arahan yang
jelas, dan memberikan
dukungan saat mengha-
dapi tantangan.

Sosok yang baik tidak
hanya memperhatikan
kepentingan pribadi,
tetapi juga peduli ter-
hadap kesejahteraan
dan perkembangan
orang lain.

“Sifat tersebut
ada pada Petrus
Golose yang
senantiasa beru-
saha belajar dan
berkembang. Dia
terbuka terhadap
perubahan dan
menerima umpan
balik dengan ren-
dah hati,” tambah
Royke.

Tidak hanya itu,
Royke juga me-
nyebutkan bahwa

kemampuan Petrus Golose dalam beradap-
tasi dan mengatasi kesulitan menjadi con-
toh yang kuat bagi orang lain, khususnya
masyarakat Sulut.

“Memang, tidak ada manusia yang sem-
purna dan sosok baik pun memiliki kelemah-
an dan kesalahan. Namun, penting untuk
terus berupaya belajar dan berkembang
menjadi versi yang lebih baik dari diri sendi-
ri,” tutur Royke.

Royke juga mengingatkan PDIP Sulut
tentang pentingnya mencari sosok yang
baik sebagai teladan dan mengambil inspi-
rasi dari kualitas positif mereka untuk mem-
bentuk kepribadian yang lebih baik.

Sejauh ini, Partai Golkar menjadi partai
politik yang menyatakan ingin mengukung
Petrus Golose sebagai calon gubernur Sulut
pada Pilkada 2024.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulut,
Feryando Yoyo Lamaluta, menjelaskan
bahwa jika Komjen Petrus Golose bersedia,
maka akan dicalonkan sebagai calon gu-
bernur Sulut. Saat ini, Petrus Golose belum
mengungkapkan sikapnya terkait tawaran
tersebut.

Namun, ada aspirasi kuat yang me-
nyokong langkah jenderal polisi bintang tiga
ini untuk ber- partisipasi dalam Pilkada
Sulut 2024 demi ke-
majuan daerah.

“Prestasi
cemerlang
dalam ka-
rier Petrus
G o l o s e
menjadi salah

satu alasan utama mengapa namanya di-
anggap sebagai calon yang layak,” katanya.

Petrus Golose dikenal karena berhasil
menumpas teroris internasional yakni Aza-
hari Husin. Selain itu, Petrus Golose
juga memiliki keahlian dalam
penanganan kejahatan siber
(cyber crime) dan pemaha-
man mendalam mengenai
permasalahan narkoba
yang merusak generasi
muda bangsa.

Petrus Golose juga
memiliki keahlian dalam
penanganan kasus hack-
ing. Bahkan, dia meraih gelar
Doktor Kajian Ilmu Kepolisian
setelah berhasil mempertahankan
disertasinya yang berjudul “Manajemen Pe-
nyidikan Tindak Pidana Hacking.”

Den-
gan dukungan kuat dari
Partai
y a n g
kondi-
Golkar Sulut dan potensi
dimiliki Petrus Golose,
si perpolitikan di Sulut
diprediksi akan se-
makin menarik jelang
Pilkada 2024.

Guru Besar

Komjen Petrus
Golose resmi di-
kukuhkan sebagai
Guru Besar Se-
kolah Tinggi Ilmu
Kepolisian (STIK)/
Perguruan Tinggi
Ilmu Kepolisian
(PTIK) di Audi-
torium Mutiara
S T I K / P T I K
L e m d i k l a t
Polri, Jakarta,
Senin, 24 Juli
2023.

P a d a
penguku-
han dihadiri
oleh Kapolri
Jenderal
Listyo Sigit
Prabowo,
Petrus di-
kukuhkan sebagai
guru be-
sar tetap
bidang
ilmu ke-
polisian,
k h u -
susnya bidang
Trans-
national
Orga-
nized

Crime Prosesi.

Komjen Petrus Golose dikukuhkan men-
jadi guru besar bidang ilmu kepolisian sesuai
surat keputusan Menteri Pendidikan Kebu-
dayaan Riset dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 28862/M/07/2023
tertanggal 8 Juni 2023.

Dalam acara pengukuhan
tersebut, Petrus memapar-
kan orasi ilmiah berjudul
‘New Psychoactive Sub-
stances: Tantangan Baru
dari Perspektif Transnational
Organized Crime’. Petrus
membaginya dalam tiga poin,
yaitu Kejahatan Narkotika dalam
Perspektif Transnational Organized
Crime, Emerging Threat: New Psycho-
active Substances, dan Pengarusutamaan
Konsep Depenalisasi.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, men-
gapresiasi pencapaian akademik Komjen
Petrus Golose. Bamsot menyoroti orasi
ilmiah yang disampaikan Petrus Golose
yakni New Psychoactive Substances: Tan-
tangan Baru dari Perspektif Transnational
Organized Crime. Menurut dia, kajian terse-
but bermanfaat bagi perkembangan ilmu
pengetahuan, khususnya kepolisian.

Dia menjelaskan, kejahatan transna-
sional menjadi salah satu dari tiga jenis ke-
jahatan non-konvensional yang meningkat
pesat, bersama dengan kejahatan terhadap
kekayaan negara dan kejahatan dengan
implikasi kontijensi.

“Pada periode 2014-2019 saja, kejahatan
transnasional meningkat sekitar 300 pers-
en, sementara kejahatan kekayaan negara
meningkat sekitar 200 persen,” ujarnya.

Berbagai tindak kejahatan itu, lanjut Bam-
soet, dapat mengganggu aspek keamanan,
politik, sosial, ekonomi, serta meresahkan
masyarakat yang terjadi secara mendadak
dan sulit diprediksi.

Menurut Bamsot, Petrus Golose layak
mendapatkan gelar tersebut karena dia aktif
dalam dunia pendidikan, terutama di bidang
ilmu kepolisian dengan spesialisasi transna-
tional organized crime baik di dalam mau-
pun di luar negeri.

Petrus Golose pernah mengajar di se-
jumlah perguruan tinggi luar negeri, sep-
erti University of Ljubljana di Slovenia dan
Hongkong Police College di Hongkong.
Kemudian, Petrus Golose juga mengajar di
Pascasarjana Universitas Indonesia, Pas-
casarjana Universitas Pertahanan, Akademi
Militer, STIK, Sespimmen, Sespimti, Sesko
TNI, Universitas Sriwijaya, Universitas
Udayana, Universitas Sam Ratulangi, dan
Politeknik Kesehatan Sorong.

“Kontribusi Komjen Pol Petrus Golose
dalam bidang akademik juga terlihat dari
keaktifannya menuangkan pemikirannya
melalui berbagai buku yang telah ia tulis dan
publikasikan, antara lain Seputar Kejahatan
Hacking, Deradikalisasi Terorisme, Invasi
Terorisme, serta Inovasi dan Aktualisasi dari
Bali Gebrakan Dr Petrus Reinhard Golose,”
ujarnya. ●IRY





BOBBY NASUTION INCAR CAGUB SUMUT

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, ramai menjadi perbincangan dalam bursa calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2024. Menantu Presiden Jokowi ini bakal menantang petahana, Edy Rahmayadi.

Meski belum terlalu lama terjun ke dunia politik, Bobby Nasution disebut-sebut sebagai calon gubernur Sumatera Utara yang cukup potensial.

Namun, suami Kahiyang Ayu ini nampaknya masih malu-malu untuk menyatakan ketertarikannya maju sebagai orang nomor satu di Sumatera Utara. Terkait kemungkinan menjadi calon gubernur Sumatera Utara, Bobby hanya merespons dengan gelak tawa kecil.

Dia mengatakan bahwa Pilkada 2024 masih cukup jauh dan saat ini lebih fokus pada pelaksanaan tugasnya sebagai Wali Kota Medan.

Dia juga menegaskan keinginannya untuk terus memperbaiki kondisi Kota Medan agar menjadi lebih baik di masa depan.

“Untuk pemilihan gubernur Sumut, itu baru akan terjadi pada 2024, masih cukup waktu,” ujar Bobby, Rabu, 16 Agustus 2023.

Sejumlah sosok sudah menyatakan akan maju di Pilkada Sumut 2024, di antaranya petahana, yakni Gubernur Edy Rahmayadi dan

Wakil Gubernur Musa Rajekshah. Namun, Bobby tidak memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai rencana atau strateginya terkait Pilkada Sumut 2024.

Sebelumnya, Bobby menyatakan sedang fokus untuk menangani proyek-proyek yang masih berlangsung di Kota Medan.

“Kita sedang bekerja keras di Kota Medan, karena masih banyak proyek yang sedang berjalan. Kami berharap semua proyek ini akan selesai pada 2024,” tutur Bobby.

Terkait dukungan yang dia terima, Bobby meresponsnya dengan santai. “Mari kita hanya berdoa. Tetapi, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir memberikan tanggapan positif dan senang. Saya tidak tahu, mungkin karena saya tidak lagi berada di Medan atau alasan lainnya,” kata Bobby sambil tersenyum.

Meskipun demikian, banyak relawan yang mendukung Bobby Nasution dan menginginkannya maju dalam Pilkada Sumut 2024.

“Relawan selalu memberikan dukungan dan doa. Mereka selalu mendukung kami dalam setiap langkah. Jika mereka mendukung, kami merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih,” jelasnya.

Baru-baru ini, lembaga survei Charta Politika merilis hasil dari survei mengenai tingkat elektabilitas sejumlah tokoh dalam Pilkada Sumut 2024.

Bobby Nasution berhasil mengungguli Edy

Rahmayadi dengan selisih tipis. Bobby Nasution tercatat memuncaki survei elektabilitas calon gubernur Sumut dengan perolehan 35,1 persen.

Posisi kedua tingkat elektabilitas diisi Edy Rahmayadi dengan 34,3 persen, dan diikuti Musa Rajekshah di posisi ketiga dengan 8,5 persen.

Walaupun hasil dari survei ini telah tersedia, Bobby tampaknya masih belum bersedia untuk mengungkapkan apakah ia berniat mencalonkan diri sebagai gubernur Sumut pada pemilihan berikutnya.

“Dapat dipastikan bahwa pemilihan gubernur akan dilaksanakan pada tahun 2024. Itulah yang dapat saya sampaikan,” ungkap Bobby.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, enggan berkomentar banyak soal karir politik adik iparnya itu di Pilkada 2024. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga enggan menjelaskan soal dukungannya jika memang Bobby Nasution maju sebagai calon gubernur Sumut.

Menurut Gibran, dukungan tersebut tidak datang darinya, tetapi dari warga Sumut. “Dukungan ya dari warga, bukan dari saya,” kata Gibran.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Arifin Saleh Siregar, telah membahas kemungkinan partisipasi Bobby Nasution dalam Pilkada Sumut 2024. Arifin menyatakan, langkah Bobby untuk mencapai posisi teratas di Sumut tampak semakin lancar.

“Langkah Bobby akan semakin lancar untuk menempatkan posisi teratas Cagub Sumut 2024,” ungkapnya.

Pernyataan ini muncul setelah PDIP secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan mendukung Ganjar

Pranowo sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keputusan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden akan memiliki dampak langsung pada dinamika politik di berbagai daerah, termasuk Sumut.

“Salah satu individu yang diperkirakan akan terpengaruh secara signifikan oleh keputusan ini adalah Bobby Nasution,” tambahnya.

Menurut Arifin, pengumuman tersebut juga telah memperkuat peluang Bobby Nasution dalam Pilkada Sumut 2024. Ia menyebutkan, langkah Bobby menuju posisi orang nomor satu di Sumut akan menjadi lebih mulus, terutama jika Ganjar Pranowo berhasil memenangkan Pilpres 2024.

Arifin juga menekankan, situasi ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Meski demikian, ia meyakini Bobby Nasution memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan dukungan dari PDIP sebagai cagub Sumut pada Pilkada 2024.

Pengamat Politik dan Pemerintah UIN Sumut, Faisal Riza, menyebut, unggulnya elektabilitas Bobby atas Edy Rahmayadi merupakan respons masyarakat yang mengonfirmasi dia bekerja serius selama menjadi Wali Kota Medan.

“Munculnya nama Bobby juga menjelaskan bahwa publik Sumut menginginkan perubahan berarti bagi perkembangan daerah,” kata Faisal.

Faisal menjelaskan, elektabilitas Edy yang rendah setelah nyaris satu periode menjadi gubernur tidak terlepas dari kinerja yang tak merespons keinginan masyarakat.

“Ekspektasi publik terhadap Edy menurun karena memang pemerintah tidak banyak menyahuti kehendak publik. Ini harus jadi perhatian Edy. Kalau pemerintahannya tidak bekerja dengan baik, maka mekanisme evaluasi warga akan bekerja. 34 persen itu angka kecil bagi petahana kalau mau kembali ke panggung kandidasi di pilgub mendatang,” jelasnya.

Meskipun elektabilitas Bobby unggul Edy, kata Faisal, hal tersebut tidak bisa terburu dibanggakan. Namun, tidak bisa sekadar dianggap angka tanpa substansi kerja. Kontestasi di antara keduanya akan menarik perhatian publik. Sebab ini antara keberlanjutan dan perubahan.

“Artinya calon yang tersedia juga menjanjikan banyak hal pada kita. Ini setidaknya dapat terjaga melalui kehadiran figur-figur yang ada. Masih panjang dinamika politik ini, jadi seberapa peluang para kandidat sangat tergantung pada keadaan yang mudah berubah,” pungkas Faisal Riza. ●IRY





“Pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang serta banyaknya warga yang memberi dukungan”

Ratu Tatu Chasanah

INFO PILKADA

Minggu IV • Agustus 2023

13

AIRIN PALING SIAP JADI CAGUB BANTEN

DPD Partai Golkar Banten telah mengonfirmasi akan mengusung mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, sebagai calon gubernur Banten pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Keputusan ini resmi diumumkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah, yang menyebut bahwa pemilihan Airin sebagai calon gubernur Banten didasarkan pada alasan yang kuat. Salah satu alasan utamanya adalah dukungan yang diterima oleh Airin dari kader partai dan aspirasi masyarakat.

Ratu Tatu menjelaskan, banyak anggota partai dan masyarakat yang mendukung Airin untuk maju dalam Pilkada Banten 2024. Dia juga menekankan bahwa keputusan ini diambil dengan tujuan untuk memastikan kemenangan Partai Golkar di berbagai tingkatan, mulai dari kota, kabupaten, hingga tingkat provinsi dalam Pilkada Serentak 2024.

“Pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang serta banyaknya warga yang memberi dukungan,” ungkap Bupati Serang dua periode ini.

Ratu Tatu menegaskan, Partai Golkar tidak hanya mengincar kemenangan parsial, tetapi berambisi meraih kesuksesan menyeluruh dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pilkada. Menurutnya, Pilkada Banten 2024 akan sangat dipengaruhi oleh figur calon, hasil Pemilu 2024, dan jadwal penyelenggaraan yang bersamaan.

Golkar berupaya untuk mendukung figur-figur calon yang memiliki kekuatan dan popularitas, baik dalam konteks calon bupati maupun wali kota.

Dalam rangka meraih kesuksesan di Pilkada Banten, Partai Golkar akan menerapkan strategi piramida. Mereka akan memperkuat calon-calon di tingkat kabupaten/kota terlebih dahulu sebelum memfokuskan pada pemilihan gubernur.

“Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan stabilitas dan dukungan di tingkat paling dasar hingga puncaknya, yaitu Pilgub,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim, mengatakan dalam beberapa roadshow, Airin telah mengungkapkan visinya untuk pembangunan Banten ke depan. “Respons sangat positif, baik dari segi penerimaan terhadap kepribadiannya maupun visi yang disampaikan,” imbuhnya.

Sementara, Airin Rachmi Diany juga terus menjalankan serangkaian silaturahmi ke berbagai wilayah di Banten. Salah satunya ke wilayah Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Tujuannya adalah untuk lebih memahami kebutuhan dan aspirasi

masyarakat setempat.

“Saya melakukan ini karena ingin mengamati secara pribadi apa yang sedang terjadi di masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan serta pandangan mereka,” kata Airin.

Airin berharap, jika kelak terpilih sebagai gubernur Banten, ia akan mampu merancang program-program dan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Banten.

“Saya berupaya untuk menciptakan program pembangunan yang berfokus dan sesuai sasaran dengan mengedepankan kebijakan yang tepat,” ujar Airin.

Airin juga dengan tegas menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja lokal di Banten. Dia mendorong agar perusahaan dan pelaku usaha lebih transparan mengenai kebutuhan tenaga kerja mereka.

“Kunci utamanya adalah transparansi dan keterbukaan dari pihak pengusaha saat mengalokasikan kuota pekerja, perlu diumumkan secara terbuka. Selain itu, masyarakat setempat harus aktif terlibat dalam proses ini, bukan hanya sebagai penonton pasif,” kata Airin saat berkunjung ke wilayah Jawilan, Kabupaten Serang.

Airin juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan para pengusaha. Oleh karena itu, ia merasa perlu adanya upaya untuk memberikan keterampilan khusus melalui program pelatihan bagi tenaga kerja lokal.

“Pemberian pelatihan dan peningkatan keterampilan kepada masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan yang spesifik dari perusahaan. Program pelatihan ini harus diarahkan dengan jelas,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Airin juga menyoroti pentingnya pendidikan dan peningkatannya sebagai prioritas utama. Menurut Airin, ada tiga solusi yang berpotensi menjawab tantangan PPDB berbasis zonasi untuk SMA dan SMK. Solusi tersebut meliputi pendirian sekolah baru, penambahan kapasitas ruang kelas, dan pemberian beasiswa langsung kepada siswa.

“Terkait persoalan reputar SMA dan SMK d a l a m konteks P P D B b e r - basis z o - nasi i n i

muncul tiga solusi. Pertama, pembangunan sekolah baru, dengan syarat sekolah swasta terdekat tetap tidak terpengaruh. Perluasan fasilitas ruang kelas, namun kedua alternatif ini memerlukan rentang waktu dua tahun, bahkan satu tahun,” jelas Airin.

Airin menegaskan, SD dan SMP sudah diperluas menjadi dua hingga tiga lantai.

Pendekatan ketiga yang diusulkan oleh Airin adalah penerapan beasiswa bagi pelajar di Banten di lembaga pendidikan swasta. “Orang tua mungkin mempertimbangkan keterjangkauan dan kualitas sekolah negeri. Namun, untuk sekolah swasta, kami sedang mempertimbangkan pemberian beasiswa, bergantung pada pemeliharaan kualitas pendidikan oleh lembaga swasta tersebut,” jelasnya.

Perempuan kelahiran Banjar, 28 Agustus 1976, ini menyebut pentingnya pemberian beasiswa langsung kepada siswa, baik di sekolah swasta m a u - p u n

madrasah. Ia berkeinginan untuk merancang program-program kegiatan yang memiliki manfaat nyata, tetap berfokus pada sasaran, dan sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh warga Banten.

“Saya mohon doa dari semua agar saya bisa menjadi pemimpin yang dapat dipercaya dan konsisten dalam perjuangan ini,” pungkasnya.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Stratak Indonesia, Octarina Soebardjo, menyebut Pilkada Banten 2024 menjadi menarik karena tokoh-tokoh yang punya pesona akan ikut turun dalam kontestasi. Ia menyebut dua nama populer yaitu Airin Rachmi Diany dan Rano Karno.

Menurutnya, baik Airin maupun Rano adalah dua nama yang punya daya pikat, sehingga kehadirannya di ruang publik dan di masyarakat akan membuat riuh ramai. Rano adalah aktor tiga zaman sementara Airin adalah tokoh perempuan yang cantik dan menarik.

Octarina menilai jika keduanya turun dalam kontestasi maka pilkada Banten semakin menarik. Hanya saja faktor dukungan partai, jaringan kerja pemenangan dan pendanaan akan menjadi penentu pasti tidaknya dua tokoh itu ikut pilkada. Sejauh ini menurutnya Airin tampak lebih siap.

“Melihat masifnya kampanye Airin, publik bisa menilai dia cukup serius dan siap segalanya,” ujarnya.

Octarina menyarankan Airin sebaiknya mulai meneropong siapa bakal calon wakilnya. Jika calon wakil sudah ada dan keduanya mulai konsolidasi serta bagi area kampanye, maka kemenangan akan mudah didapat. Ada banyak tokoh yang layak menjadi calon wakil gubernur, di antaranya

Arief Wisman-syah, Ade Sumardi, dan lain-lain. ●IRY



“Praktik politik uang menjadi isu di hampir semua tahapan pemilu. Tidak saja berkutat di masa kampanye, isu ini jauh-jauh hari juga berpotensi terjadi di masa sebelum kampanye”

Lolly Suhenty



SEMUA TAHAPAN PEMILU DISUSUPI POLITIK UANG

Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan praktik politik uang sangat diperlukan untuk melahirkan proses dan hasil pemilihan umum yang bersih dan kredibel.

Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 menegaskan aspek keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam upaya pencegahan dan penindakan praktik politik uang.

Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat juga sangat penting untuk memperkuat kesadaran akan bahaya politik uang bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Kesimpulan ini terekam dari analisis tematik isu politik uang termasuk sumber kerawanan yang rentan terjadi di pelaksanaan pemilihan umum.

“Praktik politik uang menjadi isu di hampir semua tahapan pemilu. Tidak saja berkutat di masa kampanye, isu ini jauh-jauh hari juga berpotensi terjadi di masa sebelum kampanye,” kata Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, Minggu, 13 Agustus 2023.

Lolly mengatakan, di masa sebelum kampanye ini, area dari obyek pengawasan sangat luas karena regulasi hanya membatasi potensi politik uang terjadi dengan melibatkan pelaksana, peserta dan tim kampanye.

“Tidak seperti di hari pemungutan suara yang mencakup frase setiap orang yang tentu lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan penindakan,” terangnya.

Upaya pencegahan dan penindakan praktik politik uang juga di hadapkan pada terjadinya komodifikasi, terutama dengan penggunaan uang digital.

Selain itu, praktik politik uang acap kali dibungkus dengan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk program pemerintah yang terkadang membuat bias batasan antara penyaluran bantuan dengan politik uang.

Lolly menyampaikan bahwa praktik politik uang tidak hanya melibatkan peserta pemilu, seperti tim sukses dan tim kampanye.

“Namun juga rentan melibatkan penyelenggara pemilu dan aparatur sipil negara yang semestinya menjaga netralitasnya,” jelasnya.

Lolly mengatakan, isu politik uang menjadi lima isu besar yang menyumbang kerawanan di pemilu. Data ini tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, namun juga di tingkat kabupaten/kota.

Data IKP Tematik politik uang ini menunjukkan, sebanyak 50,2 persen kabupaten/kota mencatat pengakuan adanya laporan politik uang. Hal yang sama juga terjadi di tingkat provinsi. Sebanyak 64,7 persen provinsi terdapat laporan politik uang.

Hasil analisis tematis isu strategis politik uang dalam IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini merekam, dari 34 provinsi yang dijadikan unit analisis, setidaknya ada lima provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi

terjadinya praktik politik uang.

“Ke lima provinsi

tersebut adalah Maluku Utara dengan skor tertinggi 100, kemudian disusul Lampung (55,56), Jawa Barat (50,00), Banten (44,44), dan Sulawesi Utara (38,89),” bebernya.

Hal yang sama juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Tidak ada kabupaten/kota yang masuk kategori rendah di indeks kerawanan terjadinya politik uang.

Dari 514 kabupaten/kota yang dianalisis datanya, sebanyak 24 kabupaten/kota (4,7 persen) masuk kategori rawan tinggi terjadinya praktik politik uang.

Dari 24 kabupaten/kota tersebut, lima di antaranya yakni di Kabupaten Jayawijaya (100), Kabupaten Banggai (69,49) dan Kabupaten Banggai Kepulauan (72,86), Kabupaten Sekadau (67,80), dan Kabupaten Lampung Tengah (47,46).

“Sementara itu, sebanyak 490 kabupaten/kota sisanya masuk kategori kerawanan rendah terjadinya praktik politik uang,” jelasnya.

Modus praktik politik uang pun beragam, setidaknya ada tiga modus yang biasa dilakukan di lapangan, yakni memberikan uang secara langsung, baik uang fisik maupun uang digital, memberikan dalam bentuk barang dan memberikan janji.

“Ketiga modus ini marak terjadi dan disinyalir hampir di semua tahapan pemilu maupun pemilihan,” katanya.

Lebih lanjut Lolly menyampaikan bahwa mayoritas wilayah rawan terjadi praktik politik uang, baik dengan kategori tinggi maupun sedang, tidak mudah bagi upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakannya.

Selain rekam jejak politik uang yang begitu melekat, sikap per-

misif masyarakat terhadap praktik politik uang juga menambah deretan tantangan dalam pencegahan dan penindakan.

Untuk itu, berpijak dari hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di isu politik uang ini, ada sejumlah rekomendasi yang penting dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan praktik politik uang.

Lolly menambahkan, partisipasi publik menjadi modal bagi upaya pencegahan dan penindakan politik uang. Caranya dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan kerugian politik uang terhadap demokrasi di Indonesia.

“Diharapkan kesadaran masyarakat semakin menguat dan lebih optimal terlibat bersama Badan Pengawas Pemilu melakukan pencegahan politik uang,” katanya.

Semakin beragamnya modus praktik politik uang, terutama dengan fenomena maraknya penggunaan uang digital, menuntut langkah-langkah pencegahan yang lebih masif dan adaptif dengan perubahan yang ada.

Dibutuhkan pendampingan yang optimal di tengah masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya politik uang. Penguatan kader-kader pengawasan partisipatif menjadi salah satu kunci penguatan partisipasi masyarakat

Selain itu, lanjut Lolly, belum optimalnya regulasi dalam menjerat pelaku politik uang, semestinya tidak menjadi penghambat.

“Inovasi dan kreasi dalam agenda pencegahan politik uang menjadi kunci untuk menguatkan agenda pencegahan dan penindakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perlawanan pada praktik politik uang,” imbuhnya.

Lolly mengatakan, keterlibatan masyarakat juga perlu didukung komitmen pemangku kepentingan, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu beserta tim sukses, serta pemerintah untuk bersama-sama menjadikan pelaksanaan Pemilu

2024 dilakukan secara jujur dan adil.

•RDO





“Yang paling sedikit provinsi calon DPD adalah Sulawesi Utara sebanyak delapan orang”

Idham Holik

INFO
KPU

15

Minggu IV • Agustus 2023

JABAR JADI LUMBUNG CALEG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan daftar calon sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Pemilu 2024.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, menjelaskan, nama-nama bakal caleg DPR dan DPD yang masuk ke dalam DCS tersebut akan diumumkan pada 19–23 Agustus 2023. Pengumuman akan dilakukan melalui sejumlah media yang ditentukan KPU.

“KPU akan mengumumkan kepada masyarakat luas daftar calon sementara tersebut melalui media yang ditentukan oleh KPU, dan juga melalui laman-laman yang dimiliki oleh KPU dan juga media sosial KPU,” kata Hasyim pada konferensi pers di Media Center KPU, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023.

Beriringan dengan pengumuman itu, masyarakat juga dapat mencermati nama-nama bakal caleg yang masuk ke dalam DCS.

“Sejak diumumkan besok, tanggal 19-28 Agustus 2023, warga masyarakat, warga negara Indonesia, diberikan kesempatan untuk mencermati, memberi tanggapan, dan masukan terhadap nama-nama calon tersebut,” kata Hasyim.

Anggota KPU, Idham Holik, menjelaskan penetapan DCS tersebut dilakukan setelah melalui tiga tahapan, yakni masa awal pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif (caleg), masa perbaikan dokumen persyaratan bakal caleg, dan masa pencermatan rancangan DCS.

Jumlah bakal caleg, kata Idham, mengalami pengurangan dari tahapan awal hingga ditetapkan DCS. Hal tersebut karena terdapat bakal caleg yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan hasil verifikasi.

Total DCS DPR Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU adalah sebanyak 9.925 orang bakal caleg. Dari jumlah itu, rata-rata bakal caleg DPR perempuan mencapai angka 37,3 persen. Sementara itu, total DCS DPD Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU berjumlah 674 orang bakal caleg.

“Dalam draf DCS yang akan kami umumkan itu, totalnya 674 bakal (caleg) dengan rincian 540 laki-laki dan 134 perempuan,” papar Idham.

Ia mengatakan jumlah bakal caleg DPR yang ditetapkan dalam DCS tersebut mengalami pengurangan sejak tahapan awal pendaftaran. Pada tahap

awal pendaftaran, 18 partai politik peserta Pemilu 2024 telah mengajukan sebanyak 10.323 bacaleg.

“Berdasarkan hasil vermin (verifikasi administrasi), ini tidak seluruhnya dinyatakan MS (memenuhi syarat), masih banyak yang belum dinyatakan MS (belum memenuhi syarat/BMS),” papar Idham.

Dari 10.323 bacaleg DPR itu, hanya 10.196 bacaleg yang melaju ke tahapan perbaikan dokumen. Jumlah tersebut kembali berkurang hingga menjadi 10.185 orang bacaleg pada tahapan pencermatan rancangan DCS.

Idham merinci bahwa dari total 9.925 DCS DPR RI, sebanyak 1.507 bakal calon berusia 21–30 tahun. Kemudian, 1.757 bakal calon berusia 31–40 tahun, dan 2.743 bakal calon berusia 41–50 tahun.

“Untuk rentang usia 51–60 tahun sebanyak 2.681, selanjutnya untuk usia di atas 61 tahun sebanyak 1.237,” sambung Idham.

Idham merinci jumlah bacaleg DPR pendatang disabilitas. Ia mengatakan terdapat delapan bacaleg disabilitas dengan rincian tujuh disabilitas fisik dan satu disabilitas sensorik ungu.

“Ini yang tersebar tiga orang di PPP, satu orang di Partai Golkar, dan satu di Partai NasDem, satu di PKS, satu di PBB, satu di Partai Perindo, satu di PSI,” kata Idham.

Selain itu, Idham juga memerinci, mulanya jumlah bakal caleg DPD yang meminta akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) adalah sebanyak 1.030 orang. Kemudian, bakal caleg yang mengikuti penyerahan dukungan adalah 865 orang.

“Jumlah calon memenuhi syarat dukungan ada 701. Ya yang tentunya jumlahnya ini lebih sedikit karena dahulu itu jumlahnya 811 yang memenuhi syarat dukungan,” ucap dia.

Dari total 701 bakal caleg DPD

yang memenuhi syarat, terdapat sebanyak 683 orang yang mendaftar.

“Selanjutnya, dari 683 calon yang mendaftar tersebut pada masa kemarin verifikasi administrasi, yang memenuhi syarat (MS) itu 113 orang, yang BMS (belum memenuhi syarat) 568 orang, yang TMS (tidak memenuhi syarat) dua orang,” rinci dia.

Sementara itu, pada tahap verifikasi akhir, terdapat 675 bakal caleg yang MS dan delapan bakal caleg yang TMS. Namun, dikarenakan ada satu orang yang mengundurkan diri, total DCS DPD adalah sebanyak 674 orang dengan rincian 540 laki-laki dan 134 perempuan.

Idham pun mengatakan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan bakal caleg DPD yang paling banyak ditetapkan dalam DCS, yakni sebanyak 54 orang. Disusul Aceh sebanyak 30 orang dan Riau sebanyak 29 orang.

“Yang paling sedikit provinsi calon DPD (adalah) Sulawesi Utara sebanyak delapan orang,” papar dia.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, memberikan analisisnya terkait Jawa Barat sebagai penyumbang DCS terbanyak untuk legis-

latif, baik DPR maupun DPD. Menurutnya, fenomena itu karena jumlah pemilihnya besar, sehingga jumlah kursinya banyak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

“Tapi, dengan banyaknya DCS itu bukan berarti mereka dapat dengan mudah meraih suara, justru sulit. Karena, semakin banyak DCS semakin banyak pula suara atau pilihan coblosan dari masyarakat. Jabar menjadi pertarungan yang sengit lantaran jumlah pemilihnya banyak, sekaligus menjadi perhatian nasional,” katanya.

Selain itu, Jabar bisa menjadi lumbung suara bagi partai politik. Sebab, biasanya elit partai politik di Jakarta melihat Jabar menjadi area pertarungan khusus dengan suara terbanyak, lalu Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Saya melihat DCS banyak ya karena pemilihnya banyak. Jadi, untuk menang di Jabar bagi calegnya itu agak berat, tak ada yang mudah setiap daerah pemilihan apalagi di Jabar. Intinya, tak ada korelasi DCS yang banyak dengan tingkat kemudahan untuk bisa diraih caleg, justru sangat berat Jabar ditaklukan,” ucapnya.

Ujang menilai paling enak itu dapil-dapil yang jumlah pemilihnya sedikit alias kecil. Tapi, jumlah calegnya pun sedikit. Hal yang mesti dilakukan parpol adalah memunculkan caleg berkualitas, bagus, dan mempunyai uang.

Disinggung terkait intelektual masyarakat di Jabar yang masih rendah, kondisi tersebut diakui Ujang yang menyebut berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata masyarakat di Indonesia umumnya lulusan SMP. Untuk di Jabar, Ujang mengatakan banyak masyarakat yang tinggal di desa, sehingga banyak yang masih rendah secara intelektualitas.

“Disadari atau tidak, soal caleg itu sosialisasi justru sulit kepada intelektual yang rendah. Pasalnya, caleg butuh kerja ekstra menjelaskan misalnya cara mencoblos di kertas suara karena tak ada foto, hanya ada nomor urut dan nama. Jika sosialisasi ke intelektual rendah, maka tantangan yang dihadapi caleg besar. Sebaliknya, jika intelektual tinggi justru sosialisasi jadi mudah,” katanya. ●RDO





TAHAPAN PEMILU MASIH BERANTAKAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum menyisakan waktu sekitar tujuh bulan lagi, namun prosesnya dinilai masih kacau. Lembaga penyelenggara masih terkesan belum siap, padahal saat ini sudah memasuki tahun politik.

Berbagai pelanggaran Pemilu seperti dibiarkan berjalan santai karena tidak adanya pengawasan, baik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang masih disibukkan pelaksanaan seleksi maupun pemerintah.

Ketidaksiapan ini dipicu lambatnya pencairan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pelaksanaan pemilu, sehingga berdampak terhambatnya pelaksanaan berbagai tahapan Pemilu 2024.

Sementara pendataan dari calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih semrawut. Hal ini terlihat dari banyaknya caleg bermasalah yang masih dibolehkan mendaftar tanpa ada verifikasi lanjutan.

Bawaslu sendiri masih disibukkan menggelar pelaksanaan seleksi di daerah. Keterlambatan pengumuman seleksi Bawaslu di 514 kabupaten dan kota yang dilaksanakan Bawaslu RI menyebabkan terjadinya kekosongan lembaga pengawas ini di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun masa jabatan para anggota Bawaslu di 514 kabupaten/kota telah berakhir pada 14 Agustus 2023. Keterlambatan pengumuman hasil seleksi calon komisioner Bawaslu ini juga berdampak pada pelanggaran yang dilakukan tidak ada larangan sama sekali karena tidak ada personel berwenang yang melakukan penindakan.

Untuk sementara pengawasan pelanggaran pemilu diserahkan Bawaslu RI ke Bawaslu provinsi yang masih disibukkan dengan melakukan seleksi untuk tingkat kabupaten/kota.

Keterlambatan pengumuman hasil seleksi Bawaslu di 514 kabupaten/kota tersebut, berpotensi mengganggu kesinambungan pengawasan tahapan pemilu. Akhirnya kepercayaan publik kepada proses pemilihan dan penyelenggaraan pemilu menjadi pertanyaan

besar sebagian masyarakat yang merasa Bawaslu belum siap untuk memastikan pemilu berjalan dengan semestinya.

Anggota Bawaslu Sumsel, Massuryati, mengatakan, sesuai dengan surat dari Bawaslu RI Nomor 565 tertanggal 15 Agustus 2023, pengawasan pelanggaran pemilu di daerah diambil alih Bawaslu provinsi.

“Bahwa Bawaslu provinsi melakukan pengambilalihan tugas dan wewenang dan kewajiban untuk Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota. Sejak berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu kabupaten/kota periode 2018-2023 pada 14 Agustus 2023,” terangnya.

“Berdasarkan surat dari Bawaslu RI untuk pelaksanaan pelantikan anggota Bawaslu tingkat kabupaten/kota akan dilaksanakan pada 18-20 Agustus 2023, jadi untuk kebijakan semua diambil alih oleh Bawaslu provinsi,” tegasnya.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel mengumumkan lebih dari 100 bakal caleg DPRD Sumsel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

Meskipun batas akhir perbaikan dokumen bakal caleg DPRD Sumsel untuk Pilleg adalah 14 Februari 2024, tetapi saat ini sudah ada sekitar 100 bakal caleg yang tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pemilu 2024.

Kemudian, ada juga empat mantan narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk berkompetisi merebut 75 kursi di DPRD Sumsel. Data dari KPU Sumsel menunjukkan bahwa lebih dari 100 bakal caleg yang belum memenuhi syarat, mayoritas berasal dari partai baru atau non-parlemen.

Berdasarkan catatan KPU Sumsel, masih banyak bakal caleg yang tidak melakukan perbaikan dokumen hingga batas waktu yang ditentukan. Ini mengakibatkan mereka dinyatakan TMS.

Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin menjelaskan bakal caleg yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berasal dari partai parlemen, termasuk dua partai non-parlemen dan partai baru seperti Hanura dan PKN.

Bakal caleg yang masih berstatus TMS dikarenakan beberapa partai tidak melakukan perbaikan dokumen mereka, meskipun KPU telah memberikan kesempatan untuk mel-

akukannya hingga 11 Agustus, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dokumen pada 12-15 Agustus 2023.

“Beberapa partai masih terlihat mengabaikan perbaikan dokumen ini. Sebagian besar dokumen tidak diperbaiki, termasuk ijazah, keterangan kesehatan dan rohani, dan lain-lain,” jelas Amrah.

Kondisi ini akan berdampak pada jumlah caleg dalam partai yang dinyatakan TMS. Jumlahnya dipastikan akan berkurang dan tidak akan diumumkan pada saat Daftar Caleg Sementara (DCS) nanti, serta tidak bisa dilakukan perbaikan lagi. Sehingga, jika satu partai memiliki 45 bakal caleg yang memenuhi syarat, mereka dapat mengganti bakal caleg tersebut sebelum penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) pada awal November mendatang.

Amrah mengungkapkan, ada beberapa hal yang menyebabkan banyak bakal caleg bermasalah. Pertama, partai politik sulit mencari kader. Hal itu biasanya menimpa parpol baru di Pemilu 2024 karena diwajibkan minimal merekrut 75 bakal caleg untuk memperebutkan kursi di DPRD Sumsel.

“Tidak gampang bagi parpol baru untuk memenuhi 75 orang yang mau bersaing di DPRD Sumsel, sehingga ada kesan perekrutannya asal memenuhi kuota saja,” ucapnya.

Kedua, polemik pemilihan secara terbuka dan tertutup membuat partai politik sedikit terhambat saat melakukan perekrutan. Keputusan MK yang mengumumkan menggunakan sistem proporsional terbuka dilakukan menjelang masa penutupan pendaftaran caleg.

“Banyak calon yang memutuskan untuk tidak ikut walaupun mereka mungkin sudah melengkapi berkas, sehingga parpol akhirnya mencari yang baru,” jelasnya.

Ketiga, butuh biaya besar karena banyak persyaratan dan administrasi harus dipenuhi seorang bakal caleg, mulai dari surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat bebas narkoba, dan syarat lainnya.

Kelengkapan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta cukup merepotkan. Hal ini juga bisa menjadi salah satu penghambat para bakal caleg sehingga enggan melengkapi berkas.

Di sisi lain, KPU Sumsel juga meloloskan beberapa bakal caleg yang sebelumnya berstatus narapidana dan sempat kehilangan hak politiknya. Setidaknya ada empat bakal caleg yang dinya-

takan lolos DCS. Salah satunya Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sumsel, Lucianty, yang sempat terjerat kasus dugaan korupsi beberapa tahun silam.

Pengamat politik Ardiyan Saptawan menilai semua permasalahan itu merupakan implementasi dari tidak lancarnya anggaran dari pemerintah ke lembaga berwenang. Sehingga durasi tahapan pelaksanaan menuju Pemilu 2024 menjadi panjang. Hal ini diperparah dengan lambatnya antisipasi, baik dari lembaga penyelenggara maupun pemerintah.

“Untuk tahapan persiapan saat ini belum bisa dikatakan kalau lembaga penyelenggara Pemilu tidak siap karena kan memang masih DCS. Tapi kalau dikatakan kurang koordinasi dengan pemerintah, memang benar. Seharusnya pemerintah daerah juga ikut membantu. Mereka kan punya dana taktis, bisa dipinjam dulu sebenarnya,” terang Dosen FISIP Universitas Sriwijaya (Unsri) ini.

Dia mengatakan, lambatnya proses tahapan pemilu akibat lamanya anggaran diturunkan seperti sekarang ini berpengaruh terhadap pelaksanaan di lapangan. Imbasnya bisa terjadi seperti sekarang, yakni Bawaslu masih melakukan proses pembentukan di kabupaten/kota, dan masih ditemukannya bakal caleg bermasalah. Selain itu, banyaknya spanduk-spanduk caleg bertebaran di jalan, gedung dan taman tanpa ada penertiban sama sekali, baik dari pemerintah maupun penyelenggara Pemilu.

Kemudian, maraknya kampanye hitam, kampanye negatif, serta pelanggaran lainnya, baik di media sosial maupun di ruang publik.

“Harusnya di masa tahapan seperti sekarang, tugasnya pemerintah yang menertibkan, mulai dari Pol PP hingga Kominfo dengan melakukan koordinasi aparat penegak hukum dan lembaga penyelenggara pemilu. Namun, hingga sekarang belum ada juga tindakan dari pemerintah,” tegas Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu FISIP Unsri ini.

Ardiyan juga melihat sikap ketidakprofesionalan aparat pemerintah terkait banyaknya pelanggaran yang masuk mereka sekarang. Hal ini juga bisa dilihat dari bagaimana integritas pegawai negeri dalam menjaga keprofesionalan mereka di Pemilu 2024. Bahkan, integritas ini bisa diuji apakah mereka profesional atau tidak saat kepala daerah mereka berstatus petahana.

“Jujur, petahana itu juga berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya proses demokrasi dan di tubuh pemerintah sendiri,” ucapnya.

Pengamat politik Bagindo Togar menambahkan, penundaan pengumuman hasil seleksi dan pelantikan calon terpilih yang terjadi sesuai dengan jadwal mengindikasikan adanya intervensi dari elite partai politik untuk mencapai tujuan tertentu.

“Tentunya mereka memiliki tujuan dan misi yang ingin dicapai. Kita bisa mendeteksi hal ini sebelumnya dari calon-calon yang diajukan,” kata Bagindo.

Bagindo menjelaskan, sejak awal dirinya meragukan independensi Timsel Bawaslu Sumsel yang terlihat jelas memihak terhadap ormas dan organisasi kemahasiswaan tertentu. ●RDR





“Insya Allah masyarakat yang mampu menilai sendiri, semuanya sudah ada takdirnya masing-masing. Jadi cukup dengan berusaha dengan apa yang diembankan saat ini saja”

Amalia Sobli

MASIH ADA PELUANG DI DPD

Persaingan di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 tidak hanya melibatkan kader partai politik. Masyarakat biasa pun bisa mencalonkan diri di Pileg 2024 dengan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Peluang inilah yang menjadi alasan Agung Wijaya (25), pemuda asli Sumatera Selatan yang mencoba peruntungan di Pileg 2024. Awalnya dia bergabung di salah satu parpol di Sumsel karena ingin menjadi perwakilan rakyat di DPRD kabupaten/kota.

Namun karena lebih mengedepankan independensi diri, Agung Wijaya akhirnya hengkang dari partai dan memilih menjadi caleg DPD perwakilan Sumsel.

Pengalamannya berorganisasi di partai politik membuatnya tahu tentang peta-peta politik, meskipun sekarang dia tidak membawa bendera partai untuk nyaleg di Pileg 2024.

Sebagai pendatang baru, Agung Wijaya sadar dia akan bersaing dengan caleg-caleg petahana dan caleg baru yang dibekingi oleh keluarga pejabat. Misalnya anak dan istri kepala daerah, keponakan wakil rakyat, hingga keluarga menteri.

“Meskipun tidak mempunyai background pejabat, tapi saya sebagai warga biasa bisa mewakili pemuda untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat, khususnya di Sumsel. Kata orang itu harus memulai dari nol,” ucapnya.

Berjiwa sosial, Agung Wijaya mendapat dukungan dari berbagai organisasi pemuda. Salah satunya Pemuda Pancasila (PP). Dia juga aktif sebagai Ketua Advokasi di Lembaga Investigasi Negara (LIN) di Sumsel, serta koordinator bidang hukum dan tata negara di PP Sumsel.

Selain mewakili pemuda, Agung Wijaya mempunyai tujuan khusus saat menduduki kursi senator, yakni mengembangkan daerah otonomi baru di Sumsel. Salah satunya pemekaran daerah Sumatera Selatan Bagian Tengah (Sumbagteng) guna menunjang perekonomian

Sumsel lebih maju.

“Saya ingin memperjuangkan kabupaten-kabupaten baru, seperti Kabupaten Pantai Timur, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Jika tidak dipecah, APBD Sumsel bisa terbatas di 17 kabupaten/kota saja. Tapi kalau dipecah akan ada peningkatan anggaran pendapatannya dari pusat ke daerah,” ucap pemuda kelahiran 1996 ini.

Jelang Pileg 2024, pengacara yang tergabung di Posbakum Pengadilan Negeri (PN) Palembang ini juga sudah mempromosikan diri ke warga-warga di Bumi Sriwijaya, seperti blusukan ke tingkat kecamatan hingga desa.

Dari 24 orang bakal caleg DPD di Pileg 2024, Agung Wijaya mengaku dirinyalah yang menjadi caleg termuda dan itulah alasannya mewakili generasi muda.

“Ibu saya pensiunan guru, ayah sudah meninggal dunia 4 tahun lalu. Jadi mental saya sudah terbentuk mandiri untuk mencapai cita-cita mulia menjadi wakil rakyat, mewakili aspirasi rakyat,” ujarnya.

Bursa DPD RI Sumsel juga akan diisi oleh caleg petahana. Salah satunya

Amalia Sobli yang sudah lama berkecimpung menjadi senator. Kendati akan ada persaingan ketat untuk mendapatkan kursi di DPD perwakilan Sumsel, namun Amalia Sobri tidak ambil pusing untuk Pileg 2024.

Dia hanya akan terus melakukan kerja-kerjanya yang sudah dilakukan sejak 2019, yakni terus bersilaturahmi dengan masyarakat.

“Insya Allah masyarakat yang mampu menilai sendiri, semuanya sudah ada takdirnya masing-masing. Jadi cukup dengan berusaha dengan apa yang diembankan saat ini saja,” katanya.

Dia bersyukur karena semua anggota DPD dari Sumsel yang terpilih di Pileg 2019 adalah perempuan. Keterwakilan perempuan menurutnya tak hanya melekat saja pada sosoknya, tapi pada semua anggota DPD asal Sumsel.

Bahkan, dia bergabung dengan pengurus Kaukus Perempuan Parlemen, yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan perempuan, menjaga dan mengedukasi sesama perempuan politik. Sehingga, keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik tidak hanya sebagai pajangan. Namun, memiliki kemampuan yang mumpuni agar kepercayaan masyarakat kepada wakil perempuan tidak luntur.

Dia mengukin, wewenang anggota DPD sangat terbatas dan cukup menghambat pekerjaannya sebagai wakil rakyat. Hal tersebut menjadi beban sendiri baginya karena banyak

usulan dan masukan yang disampaikan, tapi seolah tidak didengar.

“Seperti pidato Ketua DPD di sidang MPR beberapa waktu lalu, DPD mengusulkan agar adanya amendemen UUD, menghapus DPD dan menambah fraksi perseorangan/non-partai dalam DPR,” ujarnya.

Selama menjadi anggota DPD, Amalia Sobri terlibat dalam beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) BumDes dan pemerintah digital. Kendati pembahasan RUU tersebut sudah rampung bersama anggota DPD, namun harus terhenti di DPR, sehingga produk UU tersebut belum bisa dirasakan masyarakat.

Dia berharap tahun depan RUU yang diusulkan tersebut bisa kembali dibahas dan disahkan oleh DPR.

“Masih banyak masyarakat yang belum paham batasan wewenang kinerja kami. Sehingga saya pribadi berinisiatif untuk membawa program pemerintah pusat ke dapil agar masyarakat dapat merasakan langsung program yang mungkin selama ini belum merata,” ujarnya.

Lalu, program lain yang digerakkan DPD seperti 100 program bedah rumah, penanaman 20.000 bibit buah, 1.500 beasiswa, buku pendidikan, makanan tambahan balita, dan obat-obatan dari Kementerian Kesehatan yang sudah dibawanya ke dapil.

“DPD memiliki tugas dan wewenang yang memang tidak bisa disamakan dengan peran eksekutif, seperti pemerintah atau kepala daerah. Selama ini, tugas dan wewenang kami di DPD untuk melakukan pengawasan dan legislasi UU, pengawasan program pemerintah dan penyampaian aspirasi daerah ke pemerintah pusat,” katanya.

• RDR



“Konsekuensi nanti adalah pemilihan presiden tidak lagi secara langsung, tapi tentu ditempatkan melalui proses pemilihan di MPR itu sendiri”

Surya Paloh



JADI LEMBAGA TERTINGGI NEGARA LAGI PRESIDEN KEMBALI DIPILIH MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berharap bisa kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Hal itu disampaikan Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

“Idealnya memang MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara, sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri, saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu,” kata Bamsoet.

Menurut dia, perundangan-undangan telah banyak berubah sejak reformasi. Salah satunya ialah perubahan dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa MPR bukan lagi lembaga satu-satunya yang melaksanakan kedaulatan rakyat.

Sesuai amanat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sebagai representasi dari prinsip daulat rakyat, maka MPR dapat diatribusi-

kan dengan kewenangan subjektif superlatif dan kewajiban hukum untuk pengambilan keputusan atau penetapan-penetapan yang bersifat pengaturan.

“Guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal mau -

pun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar,” jelasnya.

Dia juga sempat membahas pentingnya kembali merancang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, PPHN baru dapat dilakukan setelah Pemilu 2024. “Pembahasan PPHN seyogianya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat,” tambah Bamsoet.

Dia menjelaskan, pembahasan dalam PPHN nanti untuk mengatur kejadian luar biasa yang terjadi di Indonesia menjelang pemilu.

“Sekiranya menjelang pemilu terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita bersama, seperti bencana alam yang dahsyat berskala besar, peperangan, pemberontakan, atau pandemi yang tidak segera dapat diatasi, atau keadaan darurat negara yang menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Dalam kondisi itu, menurut dia, tak ada lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penundaan pemilu. Selain itu, tak diatur dalam konstitusional bahwa pemilu tertunda, padahal masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota-anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis.

Dia melihat kondisi seperti itu belum ada jalan keluar secara konstitusional setelah perubahan UUD 1945. Hal itu memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari semua masyarakat Indonesia.

“Sebab, di masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR masih dapat menetapkan berbagai ketetapan yang bersifat pengaturan untuk melengkapi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi kita,” ujar Bamsoet.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD,

La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan pihaknya menyambut baik kehendak MPR untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara.

“Sebagai sebuah jalan keluar untuk memberikan ruang bagi bangsa dan negara ini untuk merajut mimpi bersama guna melahirkan tekad bersama untuk mempercepat terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini,” kata La Nyalla.

DPD RI juga mengusulkan proposal kenegaraan dengan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara yang meliputi lima hal pokok, termasuk salah satu di antaranya mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, usulan amendemen UUD 1945 sah-sah saja disampaikan di muka umum karena itu merupakan hak setiap warga negara Indonesia (WNI).

“Ya, silakan saja, itu hak setiap orang, karena kita dulu melakukan amendemen juga karena yang lama dinilai implementasinya tidak bagus. Sekarang, sesudah diamendemen, mungkin implementasinya tidaklah bagus. Lalu, muncul gagasan lagi. Amendemen itu biasa dalam politik. Silakan didiskusikan. Bangsa ini punya hak untuk mendiskusikan itu sesuai dengan kebutuhan generasinya,” kata Mahfud.

Dia menambahkan gagasan amendemen konstitusi UUD 1945 merupakan usulan yang biasa dalam dinamika politik.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menilai pidato Ketua

DPD La Nyalla Mattalitti tentang mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan mengamendemen UUD 1945 merupakan hal yang menarik.

“Hal yang menarik tadi adalah sambutan ketua DPD, yang

membawa kembali sebuah pemikiran agar kita kembali mengamendemen UUD 1945, menempatkan posisi MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara,” kata Paloh.

Paloh menilai gagasan tersebut merupakan sesuatu yang baik, karena nantinya pemilihan presiden akan dipilih kembali lewat MPR.

“Konsekuensi nanti adalah pemilihan presiden tidak lagi secara langsung, tapi tentu ditempatkan melalui proses pemilihan di MPR itu sendiri. Saya pikir ini luar biasa, pikiran-pikiran yang bagus, ya, kan?” katanya.

Dia pun berharap gagasan yang sejalan dengan Partai NasDem tersebut mampu direalisasikan lebih konkret lagi ke depannya.

“Ini satu PR (pekerjaan rumah) tersendiri bagi MPR, DPR, DPD sendiri, untuk bersama-sama duduk, berembuk, dan mengusulkan usulan ini agar lebih konkret lagi dan segera sosialisasikan ke masyarakat,” kata Paloh.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan amendemen UUD 1945 harus dilakukan secara cermat dan terbebas dari kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (vested of interest).

“Terhadap perubahan sistem politik nasional, apalagi menyangkut hal yang sangat fundamental, kedaulatan rakyat harus dilakukan secara cermat dalam suasana hati yang baik dan bening dan terlepas dari vested of interest,” kata Hasto, Kamis, 17 Agustus 2023.

Menurut Hasto, amendemen tersebut merupakan gagasan yang perlu dicermati dan memerlukan kajian-kajian mendalam. Pasalnya, hal itu menyangkut perubahan sistem politik nasional. “Dan kami ini kan intens berkomunikasi dengan Pak Bamsoet (Ketua MPR), sehingga kami akan melakukan dialog-dialog,” ucapnya.

Namun demikian, Hasto menyebut hal penting bagi partainya saat ini bukanlah untuk mengubah sistem pemilihan presiden, dari yang dipilih secara langsung menjadi dipilih oleh MPR.

“Kalau dari PDI Perjuangan yang terpenting saat ini adalah bukan mengubah sistem pemilu secara langsung menjadi dipilih oleh MPR, tetapi bagaimana pola pembangunan semesta berencana tersebut dapat ditetapkan dan menjadi bagian dari kewenangan MPR,” jelasnya.

Hasto juga merespons pernyataan Bamsoet yang mengatakan bahwa amendemen UUD 1945 itu selaras dengan Megawati Soekarnoputri. Menurut Hasto, maksud pernyataan Bamsoet adalah Megawati mengusulkan pentingnya MPR kembali dijadikan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan haluan negara dan bukan mengubah sistem pemilihan presiden.

“Ini yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri; bukan mengubah suatu sistem pemilu presiden,” kata Hasto.

•RDO





“DPD sebenarnya dibentuk untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah. Tapi sejauh ini kan fungsi DPD sangat terbatas”

Yusak Farchan

DPD DIBUBARKAN SAJA FUNGSINYA ENGGAK ADA

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diusulkan untuk dibubarkan saja karena keberadaannya dinilai tidak ada gunanya. DPD sebaiknya dimasukkan dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara sekaligus anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie. Jimly menyebut, saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki tiga lembaga perwakilan rakyat. Sementara, negara-negara lain pada umumnya hanya punya satu (unicameral) atau dua kamar (bicameral).

“Bisa tidak ini dipikir ulang. Cukup dua saja. Ada MPR sebagai upper house dan DPR sebagai lower house. MPR ditambah satu fraksi, namanya perwakilan golongan. Di DPR tambah satu fraksi, namanya perwakilan daerah. Dengan demikian, DPD dibubarkan masuk ke DPR supaya lembaga itu ada gunanya,” kata Jimly usai Sidang Tahunan MPR di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Dia mengatakan, banyak usulan DPD yang hanya sebatas saran. Bahkan, menurut Jimly yang telah mengemban amanat sebagai anggota DPD selama empat tahun, saran-saran DPD tidak didengar oleh lembaga lainnya.

“Dia hanya memberikan saran, pertimbangan, usulan, tetapi tidak pernah didengar. Jadi, dia tidak memutuskan, padahal ini lembaga resmi. Maka harus dievaluasi, bisa nggak dia (DPD) bubar saja karena adanya (DPD) sama dengan tiadanya (DPD),” katanya.

Menurut dia, selama ini upaya memperkuat DPD kerap terbentur oleh DPR. “Penguatan DPD itu selalu terhambat oleh DPR, sebab kalau DPD kuat, berarti DPR melemah. Itu kan memindahkan kekuasaan. Jadi, susah. Jadi, kami bilang ke DPR, DPD bubar saja, tetapi perwakilan daerah masuk,” tegasnya.

Jimly juga mengusulkan harus ada kelompok, baik di MPR maupun DPR, yang mewakili golongan serta kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili. Dia mencontohkan organisasi-organisasi masyarakat, masyarakat adat, dan kelompok perempuan.

“Itu tidak terwakili. Kalau melalui pemilu, pasti kalah terus karena jumlahnya tidak banyak,” sambungnya.

Oleh karena itu, kata Jimly, kelompok-kelompok itu seharusnya ditempatkan pada utusan golongan.

“Katakanlah perwakilan golongan,

fraksi sendiri di MPR. Jadi, ada fraksi perwakilan daerah, ada fraksi perwakilan golongan, tetapi khusus untuk fraksi utusan golongan hanya ad hoc, hanya ikut rapat kalau ada sidang MPR, tetapi kalau perwakilan daerah itu harus dilembagakan di DPR supaya dia ikut mengambil keputusan. Itu kira-kira esensinya. Mudah-mudahan para pimpinan parpol bisa menerima ide ini semata-mata untuk kita menata ulang. Jangan biarkan ada lembaga, adanya sama dengan tiadanya,” papar Jimly.

Jimly juga menilai usulan amendemen UUD 1945 harus dipahami sebagai kesempatan memperbaiki sistem ketatanegaraan sekaligus sistem presidensial di Indonesia. Oleh karena itu, Jimly berpendapat usulan amendemen jangan hanya ditujukan untuk membentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan memperkuat kelembagaan MPR atau DPD, tetapi juga untuk problem-problem lain yang dihadapi saat ini.

“Apa iya (usulan amendemen) hanya khusus untuk PPHN? Sayang, karena memang banyak sekali yang harus kita perbaiki. Nah, tapi kan terpulang nanti kepada ide-ide yang bisa dihimpun oleh MPR,” kata Jimly.

Oleh karena itu, dia mengusulkan jika ada peluang amendemen, maka perlu juga membahas kembali praktik sistem presidensial di Indonesia.

“Kalau (usulan) saya, kita ini menonton koalisi-koalisi sama negosiasi capres, ini nggak sehat. Semua jadi transaksional. Belum tentu pasangan itu nanti kompak karena ini hasil negosiasi transaksi, positioning. Jadi, kalau menurut saya ini harus dievaluasi juga. Misalnya ya sudah biar presiden saja yang dipimpin langsung, satu orang. Wapres dipilih di MPR saja dari dua calon yang diusulkan presiden terpilih. Dengan begitu, calon wapres itu orang dikehendaki oleh presiden. Posisi presiden lebih kuat, tetapi juga MPR

menjadi lebih penting, lebih kuat juga karena dia memilih wakil presiden,” kata Jimly.

Dekan FISIP Universitas Sutomo, Yusak Farchan, menilai, usulan pembubaran DPD yang disampaikan Jimly Asshiddiqie melalui amendemen patut dipertimbangkan. Namun, pembubaran DPD ini harus dikaji dengan secara mendalam. Sebab, kini tengah berlangsung pemilihan anggota DPD periode 2024-2029.

“Hanya saja pembubaran DPD harus mempertimbangkan timing yang tepat, karena saat ini tengah berla-

sung tahapan pemilu, termasuk pemilihan anggota DPD RI,” kata Yusak, Jumat, 18 Agustus 2023.

Yusak menjelaskan, dibentuknya DPD untuk memberikan keadilan bagi masyarakat di daerah. Sayangnya, kewenangan DPD sangat terbatas untuk memberikan kontribusi di daerah.

“DPD sebenarnya dibentuk untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah. Tapi sejauh ini kan fungsi DPD sangat terbatas,” jelas Yusak.

Padahal, dalam ketatanegaraan, posisi DPD sama dengan lembaga legislatif lainnya seperti DPR dan MPR.

“Pasca amendemen UUD 1945, konstruksi ketatanegaraan Indonesia sebenarnya menempatkan setiap lembaga negara sama kedudukannya. Dalam UUD 1945, setidaknya ada delapan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, di antaranya MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY dan BPK,” kata Yusak.

Dia menyampaikan, keberadaan DPD juga tidak memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan di daerah karena kewenangannya terbatas.

“Problem mendasar DPD adalah terbatasnya wewenang secara kelembagaan, sehingga keberadaan DPD sama seperti tidak ada DPD,” tutur Yusak.

Maka dari itu, kata Yusak, tidak keliru jika Prof Jimly menyebut DPD seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

•RDO



“Kami juga harus mengawal kegiatan kalender Kamtibmas 2024. Selama satu tahun penuh nanti ada rangkaian pemilu, tahapan memilih presiden maupun pilkada”

Listyo Sigit Prabowo



ANGGARAN JUMBO AMANKAN PEMILU 2024

Menghadapi Pemilu 2024, pemerintah akan meningkatkan anggaran untuk bidang hukum dan pertahanan keamanan. Kementerian Keuangan tahun depan menganggarkan untuk bidang tersebut sebesar Rp324,1 triliun atau meningkat 2,3 persen dibandingkan 2023 yang sebesar Rp316,9 triliun.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kepastian hukum dan suasana geopolitik serta pertahanan keamanan menjadi sangat penting, apalagi tahun depan merupakan tahun pemilu.

“Berbagai belanja untuk mendukung tugas kepolisian, untuk meningkatkan pertahanan keamanan Indonesia, ini terus kita dukung dengan alokasi anggaran Rp324,1 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Sri Mulyani mengungkapkan, sejak 2021 hingga sekarang, anggaran di bidang hukum dan pertahanan keamanan selalu di atas Rp300 triliun. Anggaran ini termasuk untuk men-

dukung pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan pengadaan kendaraan tempur, serta pemeliharaan dan perawatan berbagai alutsista yang sudah dibeli.

“Tentu juga untuk mendukung Pemilu 2024, terutama untuk pengamanan oleh kepolisian,” kata Sri Mulyani.

Sebagai perbandingan, anggaran untuk bidang hukum dan pertahanan keamanan pada 2014 sebesar Rp124,3 triliun, 2015 Rp143 triliun, 2016 Rp209,4 triliun, 2017 Rp229,9 triliun, 2018 Rp243,8 triliun, 2019 Rp251,4 triliun, 2020 Rp259,2 triliun, 2021 Rp303,8 triliun, dan 2022 Rp311,3 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan di antara kebijakan APBN tahun depan bersama program pengentasan kemiskinan dan lain-lain.

“Tahun 2024 kita juga cadangkan untuk pelaksanaan Pemilu. Itu Pemilu dari Pilpres, Pileg, dan berbagai dinamika yang diantisipasi,” terangnya. Mantan Pejabat Bank Dunia itu juga menjelaskan bahwa dalam tahapan Pemilu, maka pemerintah turut mendukung Polri dari sisi anggaran guna fungsi pengamanan selama tahapan kontestasi politik.

Khusus untuk Polri, pemerintah memberikan anggaran sebesar Rp114,8 triliun untuk mengawal berbagai kebijakan pada

tahun depan. Adapun besaran anggaran ini terbesar ketiga di bawah Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan, alokasi Kementerian Pertahanan sebesar Rp135,4 triliun dan Kementerian PUPR Rp146,98 triliun. Sedangkan di bawah Polri, Kemendikbud Ristek sebesar Rp97,7 triliun dan Kementerian Kesehatan Rp90,3, sehingga menempati posisi kelima terbesar.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, dari total anggaran tersebut, sebesar 48 persennya digunakan belanja pegawai. Kemudian, belanja operasional sebesar 28 persen, serta belanja modal sebesar 22,8 persen.

“Terkait dengan anggaran yang turun bagi Polri pada 2024, sudah disampaikan Bapak Menko (Airlangga) dan Bu Menkeu (Sri Mulyani), tugas Polri antara lain mengawal seluruh kebijakan pemerintah agar berjalan maksimal,” ujar Sigit.

Selain itu, kata Listyo, Polri juga mesti mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. “Kami juga harus mengawal kegiatan kalender Kamtibmas 2024. Selama satu tahun penuh nanti ada rangkaian pemilu, tahapan memilih presiden maupun pilkada,” ucapnya.

Sigit menambahkan, ada beberapa kegiatan internasional yang juga harus Polri amankan. Juga kalender kamtibmas harian khususnya kegiatan di wilayah Indonesia timur.

Menurutnya ada enam sasaran prioritas Polri. Hal ini untuk menjamin keamanan, kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Polri.

“Termasuk dalam menghadapi pilpres, pemilu dan program digitalisasi, dan juga tentu upaya peningkatan layanan kepolisian,” ucap Sigit. ●RDO

Sanksi Menanti Jaksa Tak Netral

Jaksa Agung memerintahkan kepada seluruh insan Adhyaksa untuk melakukan upaya-upaya mencegah polarisasi yang semakin meresahkan masyarakat menjelang Pemilu 2024.

Wakil Jaksa Agung, Sunarta, mengatakan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk deteksi dan pencegahan.

“Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum,” kata Sunarta, Kamis, 17 Agustus 2023.

Langkah berikutnya yang harus dilakukan jaksa di seluruh Indonesia, yakni melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap segala bentuk potensi tindak pidana pemilihan umum, baik yang terjadi sebelum, saat pelaksanaan, maupun setelah diselenggarakannya pemilihan umum.

Sunarta juga mengingatkan Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus aktif, kolaboratif dan koordinatif dalam setiap penanganan laporan pengaduan tindak pidana maupun tindak pidana khusus yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah.

Menurut dia, hal itu perlu penanganan secara khusus dengan tetap mengedepankan kecermatan dan kehati-hatian guna mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat kampanye hitam yang dapat menghalangi suksesnya pemilu.

“Juga untuk menghindari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dipergunakan sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu,” pesan Sunarta.

Dia juga kembali mengingatkan agar Kejaksaan senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak memihak atau berafiliasi dengan partai politik maupun kepentingan politik manapun, terlebih dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya, khususnya dalam penegakan hukum.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana, juga menegaskan para Jaksa harus bersikap netral pada Pemilu 2024.

Dia berpandangan, mendekati Pemilu 2024, akan banyak potensi pelanggaran. Ia juga meminta agar para Jaksa bersikap netral untuk menciptakan Pemilu yang adil dan bermartabat.

“Penegak hukum enggak boleh dari sebelah mana, harus netral, agar hasil Pemilu dapat dirasakan rakyat. Netralitas ini saya minta khusus kepada para Jaksa di seluruh Indonesia.”

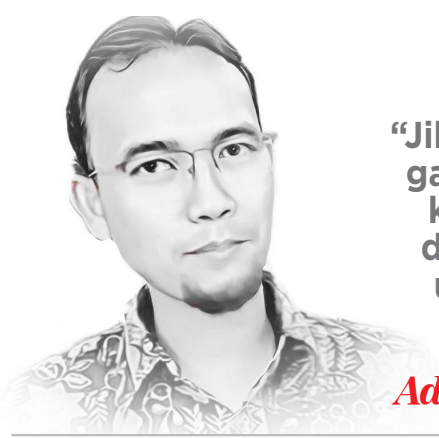
Bapak Jaksa Agung menyampaikan pesan, agar para Kajari, Jaksa di sentra Gakkumdu, menjaga netralitas,” kata Fadil.

Fadil menyebut peran Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu itu sangat penting untuk memastikan sebuah perkara apakah masuk ke ranah pidana atau pelanggaran administratif.

Sebagai informasi, Sentra Gakkumdu ini terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Selain itu, Fadil juga mengatakan dirinya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada Jaksa yang bersikap tidak netral dalam penegakan hukum Pemilu.

“Saya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi yang berat kepada jaksa yang menunjukkan ketidaknetralan dalam penanganan perkara,” pungkasnya. ●RDO





“Jika PDIP kehilangan dukungan PPP, tentu akan menjadi kerugian politik, dan hal ini dapat dimanfaatkan oleh PPP untuk meningkatkan posisi tawarnya terhadap PDIP”

Ade Reza Haryadi

PPP LAGI BINGUNG TINGGALKAN PDIP GABUNG KE PRABOWO ATAU ANIES

Pilihan politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 diprediksi masih tentatif berubah meski telah bergabung dengan barisan penguasa, yaitu koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Salah satu faktornya, gerbong yang mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden ini, tidak mendapat tambahan dukungan dari partai politik parlemen lain, seperti yang terjadi pada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mengusung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai capresnya.

Prabowo pada akhir pekan kemarin mendapat dukungan dari dua parpol parlemen yaitu Partai Golkar yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada Pemilu 2019, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menduduki urutan kedelapan suara terbanyak pada periode pesta demokrasi yang sama.

PPP sebagai parpol parlemen yang menduduki urutan paling buncit dalam Pemilu 2019, ditambah pernah bersama-sama Partai Golkar dan PAN dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), menjadi satu-satunya parpol parlemen yang mendukung Ganjar dan PDIP di Pilpres 2024.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Haryadi, menilai, posisi PPP jelang Pemilu Serentak 2024 tengah berada di persimpangan jalan, dalam arti harus memilih gerbong koalisi yang menguntungkan.

Dia mencatat, total perolehan suara PPP adalah 6.323.147 atau sekitar 4,52 persen, terbelah mepet dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen. Inilah yang membuat PPP berada di urutan kedelapan dari total sembilan parpol yang lolos parlemen pada Pemilu 2019.

Menurut sosok yang kerap disapa

Reza itu, PPP akan mempertimbangkan tetap berada di gerbong koalisi PDIP. Alasan yang mendasari itu terkait berkah elektoral yang diterima Parpol berlambang Ka'bah itu pada Pemilu Serentak 2024.

“PPP juga memerlukan PDIP untuk mendongkrak elektabilitas dengan memanfaatkan coattail effect dari Ganjar Pranowo sebagai capres yang didukungnya,” ujar Ade kepada Info Indonesia, Jumat, 18 Agustus 2023

Dosen ilmu politik UI itu memandang, di sisi yang lain PPP juga bakal memberikan keuntungan bagi PDIP yang secara garis ideologi partai berbasis nasionalisme, sementara KKIR memiliki PKB yang berbasis ideologi Islam, khususnya NU. Sehingga, bentuk keuntungan yang bisa diperoleh jika PPP direkrut adalah melebarnya ceruk pemilihan Ganjar.

“Jika PDIP kehilangan dukungan PPP, tentu akan menjadi kerugian politik, dan hal ini dapat dimanfaatkan oleh PPP untuk meningkatkan posisi tawarnya terhadap PDIP,” tuturnya.

Lebih dari itu, Reza juga meyakini PDIP punya daya tawar lebih mempertahankan PPP untuk tetap di dalam koalisi, setidaknya menunjukkan pownya sebagai dua kali pemenang Pemilu.

Bukan cuma itu, dia juga mencatat perolehan suara parpol berlambang banteng moncong putih itu bisa mengusung capres-cawapres tanpa berkoalisi, karena memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) 20 persen untuk perolehan suara atau 25 persen perolehan kursi di parlemen.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas perolehan suara partai pada Pemilu 2019, PDIP mendapat 27.503.961 (19,33 persen) atau mendapati 128 kursi di DPR yang sama dengan di atas 25 persen kursi parlemen berjumlah 575 kursi.

“Memang PDIP punya dua kartu truf yakni golden ticket untuk mengajukan capres/cawapres sendiri, dan Ganjar Pranowo kader internal yang punya elektabilitas tinggi dipilih sebagai Capres,” sambungnya menegaskan.

Kendati begitu, Reza tetap menilai PDIP dalam posisi terpojok apabila melepas PPP dari barisan koalisi. Sebab, lawan politik terberat yang menurutnya akan dihadapi Parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu cukup berat.

Sebabnya, Prabowo Subianto yang akan menjadi rival utama Ganjar yang didukung empat parpol parlemen. Belum lagi, terdapat isu yang dia peroleh soal sejumlah parpol non parlemen dan yang terbelah baru menetas jelang Pemilu Serentak 2024 ini, seperti Partai Solidaritas Indonesia

(PSI) yang dipimpin musisi kenamaan Girling Ganesha, Partai Gerakan Perubahan Indonesia Garuda (Garuda) yang dipimpin Ahmad Ridha Sabana selaku adik Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dipimpin mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang dipimpin mantan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta.

“Melihat konstelasi saat ini, terutama munculnya KKIR plus yang diisi Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan PAN, maka sangat tidak strategis bagi PDIP untuk maju Pilpres sendiri,” tuturnya.

Di samping itu, Reza juga melihat kemungkinan tantangan lain yang akan dihadapi PDIP jika mengusung Ganjar dengan cawapresnya yang masih tanda tanda di masa enam bulan jelang Pilpres 2024 mendatang, yaitu soal isu yang akan berkembang di publik mengenai karakteristik koalisi-koalisi yang ada kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tantangan Pilpres 2024 sepertinya akan diwarnai dengan isu dan potensi polarisasi sosial politik berbasis mainstream politik maupun identitas sosial,” katanya.

Berdasarkan prediksi itu, Reza berpendapat PDIP tak bisa membiarkan PPP loncat ke dalam KKIR mengingat ceruk suara partai yang dipimpin pelaksana tugas (Plt) bernama Muhammad Mardiono berasal dari kelompok Islam yang berasal dari latar belakang Ormas seperti NU hingga Muhammadiyah.

“Dalam konteks itu, maka PDIP memerlukan mitra koalisi dari Parpol maupun figur dari mainstream politik Islam yang dapat melengkapi citra PDIP sebagai Parpol nasionalis. Realitas politik itulah yang membuat posisi PPP justru menjadi semakin strategis bagi PDIP,” ungkapnya.

Adapun, Reza memandang jika ada kemungkinan PPP memilih mengibrit lari dari koalisi PDIP karena takut Ganjar akan kalah, atau tidak membiarkan efek elektoral ikutan dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024, maka yang merugi adalah Parpol itu sendiri karena terancam tidak duduk kembali dalam parlemen usai Pemilu dilaksanakan.

“Hal itu (masuk parlemen) sulit untuk diperoleh PPP jika memilih kembali pada KIB yang telah bergabung menjadi KKIR plus mendukung Prabowo. Oleh karena itu, relasi PDIP dan PPP sebetulnya saling memerlukan dan akan menguntungkan kedua belah pihak,” pungkasnya. ●RDO



“Saya melihat mengu-
mumkan AHY kelihatannya
PKS menerima saja, tetapi
dengan kompensasi poli-
tik dan finansial”

Ujang Komarudin



PKS CUMA BISA NGALAH

Partai Demokrat tetap ngotot agar sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, Partai Demokrat akan mendapatkan kerugian besar jika salah satu kader potensialnya tidak dapat maju di Pilpres 2024.

“Karena calon yang ada bisa jadi tidak memberikan tarikan elektoral bagi Demokrat pada Pemilu 2024,” kata pria yang akrab disapa Iwan, Kamis, 17 Agustus 2023.

Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan mendapatkan kerugian apapun meskipun kadernya tidak maju di Pilpres 2024. Sebab, PKS tetap akan mendapatkan elektoral dari pencapresan Anies Baswedan.

Selain itu, PKS memiliki pengalaman dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2017. Maka dari itu, efek elektoral terhadap PKS cukup besar. Apalagi, Anies dan PKS hubungan emosionalnya sangat dekat.

“Karena dengan dicalonkannya figur Anies sebagai capres, NasDem dan PKS lah yang diuntungkan secara tarikan elektoral,” jelas Iwan.

Dia menjelaskan, Anies merupakan muslim modern yang menjadi salah satu basis suara PKS dan pendukung loyalis dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Apalagi, kelompok 212 menjadi salah satu basis pendukung Anies Baswedan.

Maka dari itu, PKS akan semakin diuntungkan dengan pencapresan Anies. Sebab, dapat mengeruk suara dari pendukung Anies Baswedan yang notabene suara mereka banyak berlabuh ke PKS dan Gerindra pada Pemilu 2019.

Dia mengatakan, meski PKS tidak mengusulkan kadernya sebagai cawapres, akan tetap dengan diuntungkan dengan adanya figur Anies sebagai bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Dia menyampaikan, dalam setiap pembentukan koalisi, mereka berebut figur capres dan cawapres dari partai mereka masing-masing karena ingin mendapatkan efek ekor jas.

“Karena mereka mengharapkan tarikan ekor jas elektoral dalam pemilu legislatif dan eksekutif yang dilakukan secara bersamaan,” tutur Iwan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan, persoalan cawapres Anies Baswedan akan alot. Demokrat ngotot menyodorkan AHY, sementara PKS usulkan Ahmad Heryawan (Aher).

Dia memprediksi, ujung dari persoalan cawapres Anies Baswedan ini, PKS

nantinya akan mendukung penuh AHY sebagai pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Jadi saya sih melihat ya ujung dari drama persoalan siapa cawapres Anies kelihatannya mengarah kepada AHY,” kata Ujang.

Dia mengatakan, PKS tidak akan menerima AHY sebagai cawapres begitu saja. Kata Ujang, harus ada timbal balik yang diberikan Demokrat kepada PKS di pemerintahan mendatang jika berhasil memenangkan pesta demokrasi lima tahunan.

Sebab, posisi capres dari Koalisi Perubahan sudah dipegang oleh NasDem yang menjadi partai yang pertama kali mendeklarasikan Anies sebagai capres. Maka dari itu, NasDem tidak ikut campur dalam pembahasan cawapres.

“Bagaimana memberikan kompensasi politik finansial kepada PKS. Karena, bagaimana pun kan NasDem sudah ada capres,” kata Ujang.

Dia menyampaikan, cawapres Anies Baswedan setidaknya harus berasal dari kader anggota Koalisi Perubahan. Ujang melihat kemungkinan besar yang menjadi cawapres Anies adalah AHY.

“Maka PKS harus legowo dengan kompensasi dan finansial, deal-deal politik antara kesepakatan tiga partai, NasDem, PKS, Demokrat itu,” jelas Ujang.

Dia meyakini, PKS akan menerima jika Anies, NasDem, dan Demokrat memberikan kompensasi politik. Sebab, PKS bukanlah partai baru di lingkaran Anies Baswedan. Kata Ujang, PKS menjadi salah satu partai yang loyal mendukung Anies Baswedan.

Berkaca pada Pilkada DKI Jakarta 2017, PKS mendukung Anies sebagai gubernur. Namun, tidak mempermasalahkan posisi cawagub diberikan kepada Partai Gerindra kala itu.

“Saya yakin PKS setuju (cawapres Anies itu AHY). Dari dulu kan PKS dengan Anies, contohnya di Pilkada, mengawal pemerintahan Anies di Provinsi DKI Jakarta,” ujar Ujang.

Maka dari itu, akademisi dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu menuturkan, PKS sepenuhnya akan menerima jika Anies memilih AHY sebagai pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang.

“Saya melihat mengu-
mumkan AHY kelihatannya
PKS menerima saja, tetapi dengan kompensasi politik dan finansial. Soal elektabilitas cawapres (usulan PKS) yang jauh dari AHY ya makannya (PKS) mendukung AHY lah,” terang Ujang.

Dia menje-
laskan, ke-
beradaan
P a r t a i

Demokrat dan PKS di dalam satu koalisi itu harusnya bisa lebih cair untuk membahas cawapres Anies. Kedua partai itu harus saling terbuka satu sama lain agar mendapatkan titik temu atau kesepakatan.

“Kalau koalisi enggak ada kebijaksanaan, enggak ada kompromi, enggak ada kesepakatan untuk saling mengalah, ya susah,” jelas Ujang.

Melihat dari dinamika politik yang terjadi di internal Koalisi Perubahan, kemungkinan besar PKS akan mengalah. Lalu, memberikan kursi cawapres kepada Demokrat.

“PKS kemungkinan akan mengalah, mendukung AHY juga menjadi cawapres, Anies-AHY ujung-ujungnya. Tapi, dalam politik itu tidak ada makan siang gratis,” tegas Ujang.

Sementara itu, PKS juga tidak akan memper-
soalkan jika Anies
memilih AHY se-
bagai cawapres.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menuturkan, menjadi hal yang sangat wajar jika Partai Demokrat mengusulkan AHY sebagai cawapres Anies.

“Wajar Partai Demokrat ingin dapat tambahan suara di pil-
pres, jadi perlu di eksis di pilpres. Buat PKS, apapun keputusan Mas Anies akan didukung,” kata Mardani, Kamis, 17 Agustus 2023.

Di satu sisi, kata Mardani, PKS juga mengusulkan Ahmad Heryawan sebagai cawapres Anies. Menurutnya, Aher memiliki segudang pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Pengalaman Aher menjabat gubernur Jawa Barat selama dua periode menjadi bekal yang cukup kuat untuk bisa mendampingi Anies di Pilpres 2024.

“PKS mengusulkan Kang Aher. Punya pengalaman dan sosok ulama juga,” ujar Mardani.

Kendati begitu, mengenai cawapres dari Koalisi Perubahan, PKS sudah memutuskan untuk memberikan kewenangan penuh kepada Anies untuk menentukannya. Siapapun yang dipilih oleh Anies Baswedan, PKS akan mendukung sepenuhnya.

Dalam piagam koalisi juga sudah tertuang kesepakatan bahwa seluruh anggota partai dari Koalisi Perubahan menyerahkan urusan cawapres kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Tapi apapun keputusan Mas Anies kita akan dukung,” pungkas Mardani. ●RDO





“Intinya PDIP merasa gerah dengan sikap politik Jokowi yang semakin terang telah mendukung Prabowo. Di mata PDIP, sikap Jokowi sangat menyakitkan sebab sampai hari ini dia masih kader PDIP”

Zaki Mubarak

PDIP MULAI PANIK SERANG PRABOWO DAN JOKOWI

PDIP dibuat panik oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang akhirnya mendapatkan dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

PDIP dibuat panik oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang akhirnya mendapatkan dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Lobi-lobi politik yang dilakukan Partai Gerindra dan PKB disinyalir membangkitkan kemarahan PDIP yang kemudian merespons melalui naras-narasi negatif terhadap Prabowo Subianto. Narasi negatif itu ditengarai sengaja dibangun buntut melesatnya elektabilitas Prabowo dan Partai Gerindra paska masuknya dukungan dari Golkar dan PAN.

Selain Golkar dan PAN, Prabowo juga disebut-sebut mendapatkan dukungan dan restu dari Presiden Jokowi. Hal ini semakin membuat PDIP geram dan melancarkan serangan.

Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam KKIR. Hasto mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi terkait proyek lumbung pangan atau food estate yang dikomandoi Kementerian Pertanian.

Dalam proyek food estate itu, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan di bawah kendali Prabowo Subianto mem-back-up dan fokus mengurus lahan singkong. Adapun dalam perjalanannya, proyek itu dianggap gagal karena menghabiskan hutan yang merupakan sumber penghidupan masyarakat.

“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate. Dalam praktiknya, kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari kejahatan terhadap lingkungan-

gan,” kata Hasto di Bogor, Selasa, 15 Agustus 2023.

Di sisi lain, PDIP juga menyerang Prabowo dengan kembali memunculkan isu pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa 1998. Prabowo disebut-sebut sebagai salah satu aktor yang menjadi dalang dalam peristiwa tersebut.

Pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak, menilai, serangan yang dilakukan PDIP merupakan hal yang wajar lantaran khawatir elektabilitas Prabowo semakin melesat menggungguli Ganjar Pranowo.

Zaki mengungkapkan, kritik yang sengaja dilontarkan PDIP merupakan strategi untuk menjatuhkan Prabowo dan Presiden Jokowi. Sebab, kedua nama tersebut adalah sosok yang bertanggung jawab dalam pembangunan proyek food estate di sejumlah daerah.

“Wajar PDIP melakukan attack. Serangan itu terkait food estate yang merusak lingkungan, sebenarnya ditujukan ke Jokowi bukan Prabowo. Sebab, dibalik proyek itu adalah Jokowi,” kata Zaki.

“PDIP tahu dibalik manuver Golkar dan PAN ada peran ‘Pak Lurah’. Jadi marahnya dengan Pak Lurah, makanya diangkatlah kasus program food estate yang berantakan itu. Jika Jokowi makin renggang dan bermain sendiri, maka serangan PDIP pastinya makin kencang. Kita tunggu saja episode berikutnya,” sambung Zaki.

Selain itu, Zaki menilai, serangan yang dilakukan PDIP merupakan bentuk kemarahan terhadap Presiden Jokowi lantaran semakin terbuka mendukung Prabowo menjadi capres. Semestinya, selaku kader partai, Jokowi mengikuti perintah dan arahan Megawati

Soekarnoputri yang telah mengusung Ganjar Pranowo menjadi capres.

Zaki menambahkan, serangan terhadap Prabowo dan Gerindra adalah buntut kekecewaan PDIP yang menilai Jokowi menyakitkan perasaan karena bermain dua kaki, yakni mendukung Prabowo dibalik layar dan mengusung Ganjar di depan layar.

“Intinya PDIP merasa gerah dengan sikap politik Jokowi yang semakin terang telah mendukung Prabowo. Di mata PDIP, sikap Jokowi sangat menyakitkan sebab sampai hari ini dia masih kader PDIP. Baiknya, Pak Jokowi terbuka saja mundur dari PDIP supaya tidak dianggap berdiri dua kaki,” ungkap Zaki.

Zaki mengatakan, serangan yang dibangun PDIP bukan merupakan bentuk kepanikan melainkan peringatan keras kepada Presiden Jokowi

lantaran terlampau jauh cawe-cawe tanpa ikut memperhatikan arahan partai.

Di sisi lain, sikap yang dilakukan Jokowi yang diam-diam meng-endorse Prabowo adalah bentuk kekecewaan dirinya terhadap Megawati karena dalam beberapa agenda PDIP selalu merendahkan harkat martabatnya.

“Bukan panik, tapi PDIP lewat Hasto memberi peringatan keras dengan kritik tajamnya itu. Pasti dengan sepengetahuan Bu Mega. PDIP merasa sudah dua periode menjaga Jokowi, tapi merasa dikadali. PDIP sebaiknya juga introspeksi diri. Cara memperlakukan Jokowi sebagai presiden sangat merendahkan, tidak patut,” ujar Zaki.

Zaki menambahkan, strategi membangun kembali isu pelanggaran HAM dan kritik terhadap food estate merupakan salah satu senjata PDIP untuk menjatuhkan lawan politik seperti Prabowo dan Gerindra. Harapannya mendapatkan efek ekor jas dengan naiknya elektabilitas Ganjar.

“PDIP harus lebih all out untuk meningkatkan rating Ganjar. Beri Ganjar kewenangan yang lebih besar dan keleluasaan bergerak.

Mbak Puan jangan terlalu dominan. Kesan publik, Ganjar menjadi subordinatnya Puan, itu sangat tidak bagus,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai, terdapat empat poin yang telah melatarbelakangi serangan PDIP ke Prabowo dan Partai Gerindra.

Pertama, serangan itu merupakan bentuk kepanikan dengan mencoba membangun narasi secara bersama antara elite PDIP untuk mencoba meruntuhkan klaim kubu Prabowo di dukung Jokowi.

Kedua, serangan itu merupakan bentuk kekesalan atas perilaku dan sikap Jokowi yang dinilai telah cawe-cawe dan membelot mendukung Prabowo.

Namun, narasi PDIP yang meminta PPP keluar dari koalisi jika memaksakan sosok Sandiaga Uno menjadi cawapres Ganjar juga merupakan bentuk amarah karena tidak bisa melihat kondisi internal yang sedang dalam kondisi carut-marut.

“Ini sangat tampak dan akhirnya PDIP tak bisa menyembunyikan emosinya lalu dibawa, sehingga menyatakan PPP silakan keluar jika memaksa Sandiaga Uno sebagai cawapres,” ungkap Efriza.

Ketiga, bentuk kekecewaan PDIP dengan menyatakan KKIR belum tentu solid. Keempat, serangan yang dibangun merupakan cara PDIP untuk menguatkan hati para kader internalnya. Hal itu dapat terlihat saat narasi PDIP yang menyebut telah terbiasa dikeroyok dalam dua kali Pemilu, yaitu pada 2014 dan 2019.

“Seperti elite PDIP menyatakan ini di Jawa Tengah sebagai basis kekuatan besar PDIP,” ujar Efriza.

Efriza menilai, berbagai komentar PDIP ini menunjukkan mereka sebenarnya telah menyadari adanya kegagalan dalam membangun komunikasi dengan partai-partai pendukung pemerintah. Sebab, PAN sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Megawati. Selain itu, Partai Golkar sebelumnya juga sudah membentuk tim teknis bersama PDIP. Adapun keputusan kedua partai itu menghengkang lantaran sikap PDIP dan semakin anjloknya elektabilitas Ganjar.

“Bahkan, secara tidak langsung Ganjar sudah menyadari karena elektabilitas dirinya melorot, sedangkan Prabowo tinggi, maka ramai-ramai pindah ke Prabowo,” jelas Efriza.

Efriza mengatakan, wajar jika PDIP melancarkan serangan isu melalui narasi-narasi, karena menginginkan elektabilitas Prabowo anjlok dan posisi

Ganjar naik. Berdasarkan komentar-komentar kader PDIP itu lah, kata Efriza, menjadi tanda saat ini partai banteng tidak lagi merasa nyaman dengan adanya Prabowo di dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

“Mereka sudah melakukan serangan terbuka, mereka ingin menurunkan elektabilitas Prabowo secepat mungkin, maka wajar langsung keluar statement mengenai kasus HAM dan penculikan di awal reformasi, sasarannya Prabowo,” terang Efriza. ●RDO



“Tren elektabilitas tiga capres, Prabowo menanjak, Ganjar turun naik, dan Anies Baswedan stagnan bahkan cenderung turun”

Denny JA



PDIP-GANJAR DISALIP GERINDRA-PRABOWO

Menjelang Pemilu 2024, seluruh partai politik mulai memanaskan mesin partainya. Salah satu manuver yang dilakukan yakni dengan membentuk koalisi untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.

Pembentukan poros koalisi itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengubah peta kontestasi Pilpres 2024.

Pengaruh perubahan peta politik dinilai tersebut cukup dominan lantaran jumlah partai yang bergabung dalam koalisi nantinya bakal menentukan siapa sosok kandidat capres dan cawapres yang bakal maju untuk berkompetisi.

Di sisi lain, di tengah perjalanannya, figur capres yang diusung dalam koalisi dinilai juga dapat mengubah dukungan terhadap elektabilitas partai menjelang Pilpres 2024.

Salah satu hasil yang didapat karena terbentuknya koalisi tersebut saat ini telah dirasakan oleh Partai Gerindra. Menurut hasil survei yang dirilis Voxpol Center Research & Consulting, elektabilitas Partai Gerindra saat ini berada di pucuk dan berhasil mengalahkan PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangsi Syarwi Chaniago, mengungkapkan, elektabilitas Partai Gerindra saat ini berhasil meraih elektabilitas 25,7 persen. Ini merupakan catatan bagi Partai Gerindra bisa melampaui elektabilitas PDIP yang dalam beberapa tahun terakhir selalu mendominasi.

Saat ini, PDIP berada di posisi kedua dengan elektabilitas 22,6 persen, disusul PKS di posisi ketiga dengan dukungan sebesar 8,5

persen.

“Gerindra berhasil meraup elektabilitas 25,7 persen dan untuk pertama kalinya telah menggeser posisi PDIP yang selama ini bertahan di puncak elektabilitas, bergeser ke posisi kedua dengan elektabilitas 22,6 persen dan disusul oleh PKS 8,5 persen di posisi ketiga,” kata Pangsi, Kamis, 17 Agustus 2023.

Pangsi menambahkan, keberhasilan Partai Gerindra berada di posisi teratas tidak terlepas dari sosok Prabowo Subianto yang telah membangun strategi politik dengan membentuk poros koalisi yang terdiri dari empat partai, yakni Partai Golkar, PKB, PAN, dan Partai Gerindra.

Menurut Pangsi, faktor yang telah ikut menentukan unggulnya elektabilitas Prabowo saat ini adalah pengaruh endorsement atau dukungan dari Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu selama ini disinyalir telah berada di belakang layar untuk mendorong figur mantan Komandan Jenderal Kopassus itu maju di Pilpres 2024.

Pangsi mengatakan, sikap Presiden Jokowi yang tampak ambivalen dan memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto telah memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan elektabilitas Menteri Pertahanan itu.

Pangsi menjelaskan, berbagai pertimbangan dan faktor politik dalam sikap

Presiden Jokowi itu ditengarai telah memberikan kontribusi penting terhadap melonjaknya elektabilitas Prabowo Subianto di kalangan pemilih.

Pangsi menuturkan, dari segi elektabilitas, sosok Prabowo Subianto saat ini telah berhasil meraih elektabilitas tertinggi yakni berhasil mendulang angka 33,6, persen.

Hasil tersebut secara otomatis telah mendepak kandidat capres lain. Ganjar Pranowo hanya berhasil mendapatkan elektabilitas 28 persen dan berada di posisi kedua. Lalu, Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,4 persen.

Di sisi lain, Pangsi menuturkan, selain berhasil meraup suara elektabilitas tertinggi di pilpres, Partai Gerindra juga dinilai dapat memenangkan kontestasi di Pemilu legislatif.

Pangsi mengatakan, hal itu tentu saja tidak lepas dari melejitnya elektabilitas Prabowo Subianto yang bakal mempengaruhi suara pemilih di Pemilu 2024.

“Partai Gerindra menang efek Prabowo. Jadi kenaikan elektabilitas Prabowo signifikan otomatis menaikkan elektabilitas partai Gerindra, leading-nya elektabilitas Prabowo juga ikut berdampak mempengaruhi tren kenaikan elektabilitas partai Gerindra,” jelas Pangsi.

“Gerindra, PDIP, PKS dan Nasdem mengalami peningkatan elektabilitas dibandingkan dengan 2019. Jadi, peningkatan suara tertinggi

diraih oleh Gerindra sebesar 13 persen. Peningkatan suara ini ekuivalen dengan peningkatan suara Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden,” sambung Pangsi.

Kendati demikian, pembentukan poros koalisi besar yang menggabungkan beberapa partai pemerintahan saat ini, termasuk Gerindra dan PDIP, memiliki potensi untuk memudahkan kemenangan soal pemilihan presiden dalam format dua poros.

Pangsi mengungkapkan, beralihnya dukungan partai terhadap PDIP dan Ganjar Pranowo buntut dari tersumbatnya komunikasi sejumlah partai lain dengan partai banteng itu. Kondisi itu telah membentuk intensitas arah dukungan partai lain mengusung Prabowo pada Pilpres 2024.

“Kecenderungan per hari ini beberapa partai ada indikasi dan intensitas mendukung capres Prabowo karena tersumbatnya komunikasi dengan PDIP, pemilih partai yang bergabung ke koalisi Prabowo intensitas arah dukungan ikut memilih Prabowo,” ungkap Pangsi.

Pangsi menuturkan, para pemilih ataupun rakyat saat ini cenderung lebih mendukung Prabowo Subianto karena dianggap lebih moderat dan sosok pemimpin bangsa yang nasionalis dengan harapan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ganjar dinilai cukup digandrungi oleh pemilih segmen kiri ataupun nasionalis. Sedangkan, Anies Baswedan saat ini lebih cenderung memiliki basis pemilih dari kelompok agamis serta dianggap sebagai sosok capres yang paling religius.

“Pemilih cenderung memilih Prabowo karena dianggap lebih moderat, Ganjar cenderung memilih segmen kiri/ nasionalis, Anies lebih cenderung basis pemilih kanan/agama, sebesar 33,4 persen menganggap Anies capres yang paling religius,” tutur Pangsi.

“Sementara Prabowo cenderung di tengah, Prabowo lebih diuntungkan karena bisa mengambil dua ceruk segmen pemilih di atas. Pemilih yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri cenderung memilih Prabowo,” ucap Pangsi.

Sementara itu, hasil survei LSI Denny JA menunjukkan posisi Prabowo Subianto masih unggul atas Ganjar Prabowo dan Anies Baswedan.

Pendiri LSI, Denny JA, mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan, Prabowo Subianto berhasil menduduki posisi teratas dengan perolehan elektabilitas sebesar 38,3 persen.

Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 35,3 persen. Sementara itu, Anies Baswedan di posisi ketiga dengan elektabilitas 18,4 persen.

Denny JA menjelaskan, adapun perolehan suara elektabilitas ketiga kandidat capres itu dilakukan

berdasarkan hasil penelitian dengan melibatkan sejumlah responden dan juga rekapitulasi data statistik yang dilakukan pada Januari, Mei, Juni dan Juli 2023. ●RDO

